

- CREDIT

- SMALL BUSINESS
DLN - Permasalahan Universitas Airlangga

ANALISIS KREDIT UKM, PERMASALAHAN, DAN PERKEMBANGANNYA DI JAWA TIMUR 1997-2004

SKRIPSI

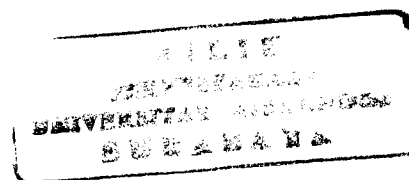
DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN



037,135
Pis
0

DIAJUKAN OLEH
PIPIT ELINA S
No. Pokok : 040117219

KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006



SKRIPSI

**ANALISIS KREDIT UKM, PERMASALAHAN, DAN
PERKEMBANGANNYA DI JAWA TIMUR**

1997-2004

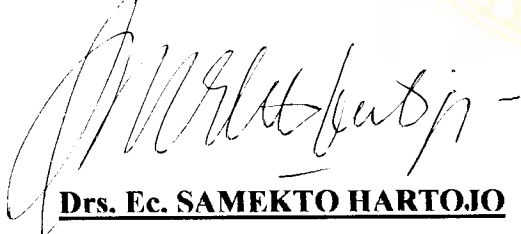
DIAJUKAN OLEH :

PIPIT ELINA S

No. Pokok : 040117219

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

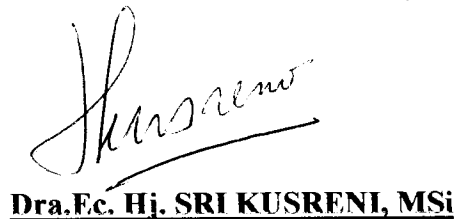
DOSEN PEMBIMBING,



Drs. Ec. SAMEKTO HARTOJO

TANGGAL...4-9-06

KETUA PROGRAM STUDI,



Dra.Ec. Hj. SRI KUSRENI, MSi

TANGGAI...05-09-06

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah S.W.T. Berkat rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Judul skripsi yang penulis angkat adalah, “ Analisis Kredit Usaha Kecil dan Menengah, Permasalahan, dan Perkembangannya di Jawa Timur 1997-2004 “.

Shalawat dan Salam tidak lupa terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad S.A.W, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari segala pihak, yaitu :

1. Bapak Drs.Ec.Samekto Hartojo selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar memberikan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs.Ec.H.Karyadi Mintaroem, MS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
3. Ibu Dra.Ec.Hj. Sri Kusreni, M.Si dan Dra.Ec.Hj.Siti Umajah selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan UNAIR
4. Bapak Dr.H Tjuk Kasturi Sukiadi, S.E yang telah memberikan pelajaran hidup bagi penulis, Ibu Wasiaturrahma, S.E, M.Si dan Bapak Wisnu Wibowo,S.E, M.Si selaku dosen konsentrasi Ekonomi Moneter

5. Mbak Nuning dan Mas Dani, terima kasih atas kesabarannya membimbing, membantu dan memberikan solusi kepada penulis dalam menghadapi permasalahan administrasi dan birokrasi selama proses penulisan
6. Bapak dan Ibu tercinta yang telah membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang yang senantiasa memberikan doa dan restu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.
7. Mbah Kakung dan Almarhumah Mbah Tri tercinta yang selalu memberikan doa kepada penulis serta Om To dan Tante Yeyen, Om Iwan dan Tante As terima kasih atas dukungannya.
8. Adikku Hendra Marsetya Suhardyan dan Whita Aurummita, terus jadi adikku yang asyik dan lucu ok!
9. Om Yadi Suharsono dan Tante Wulan yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama ini.
10. My best friend ever Dwi Kurniawan, S.E. , *thank you for all loves, inspirations, and supports*
11. Temanku di SMUN 5 Surabaya yang sampai sekarang masih terus saling *contact* Indah Virasari dan Dita Putraka Kamalia yang selalu jadi sahabatku
12. Teman-temanku yang selalu *bareng* waktu kuliah, Dhini Kristanti, Nadia, Mila, *thanks for the wonderful friendship and time that we spend together*
13. Teman-teman KTSP *movie*, Henny, Dyah, Hero Setyobudhi, Gagang Sandibuana, Bayu Dewantoro, dan Patris Ninu

14. Teman-teman EP 2001 : Vembri, Hero A, Nurlika, Ade Praja, Andry Yuniawan, Donny S, Widodo, Rahma, Tima, Alm. Encik M. Shofi dan Harno
15. Bapak Bambang beserta staf di Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah atas bantuan pemberian informasi data kepada penulis
16. Terima kasih kepada karyawan Bank Indonesia, Karyawan Ruang Baca FF. UA, dan karyawan BPS Surabaya
17. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya

Demikianlah dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini sehingga masukan dari segala pihak sangat berguna sekali untuk menyempurnakan skripsi ini di masa datang. Akhir kata semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak.

Penulis

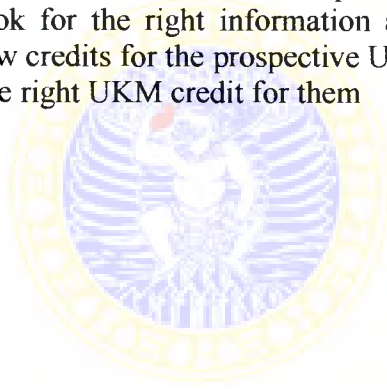
ABSTRACT

Since economy crisis happen at 1997, we can't deny that UKM is one of economy sector that could preserve to face the impact of economy crisis. UKM credit is one of support to improve UKM in Indonesia even there are another factors which could push the growth of UKM. Contribution is given to East Java's Gross Domestic Income since 2001 become the biggest contribution for province government and the exist of UKM can absorb one third of employment in East Java.

The next problem is that there were many obstacles faced by banking to give UKM credit. The other problems are the tighten of banking regulation which is related with prudential principles, the rigidity of interest rate and asymmetric information between UKM entrepreneurs and banking.

To solve those problems, Indonesian bank have to help as monetary authority. Indonesian Bank regulate some policy through some activities to meet banking and UKM entrepreneurs and so introduce some Indonesian Bank programs to increase UKM credit plafond for the growth of economy in East Java.

The cooperation between banking side do the Indonesian Bank's program to increase credit plafond and UKM effort to increase the quality of their work and so effort from both side to always look for the right information about UKM credit. Banking expected to be able to give new credits for the prospective UKM, and in other side, UKM expected to always look for the right UKM credit for them



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstraksi	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika skripsi	12
Bab 2 Tinjauan Pustaka	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Kebijakan Moneter	14
2.1.1.1 Instrumen Kebijakan Moneter	15
2.1.2 Sistem Keuangan	19
2.1.3 Bank	23
2.1.3.1 Definisi Bank	23
2.1.3.2 Jenis-Jenis Bank	25
2.1.3.3 Produk Bank	28
2.1.3.4 Fungsi Bank	30
2.1.4 Bank umum	31
2.1.4.1 Definisi Bank Umum	32
2.1.4.2 Usaha Bank Umum	32
2.1.5 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	35
2.1.5.1 Definisi BPR	35

2.1.5.2 Usaha BPR	35
2.1.6 Kredit	36
2.1.6.1 Definisi	36
2.1.6.2 Klasifikasi Kredit Perbankan	40
2.1.7 Kredit UKM	44
2.1.7.1 Definisi	44
2.1.7.2 Jenis-Jenis Kredit UKM	46
2.2 Penelitian sebelumnya	49
2.3 Model analisis	52
Bab 3 Metode Penelitian	54
3.1 Pendekatan Penelitian	54
3.2 Jenis dan Sumber data	56
3.3 Prosedur Pengumpulan Data	56
3.4 Teknik Analisis	57
Bab 4 Pembahasan	61
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	61
4.1.1 Kredit Usaha Kecil di Indonesia	61
4.1.1.1 Kredit Usaha Kecil sebelum tahun 1990	61
4.1.1.2 Kredit Usaha Kecil Tahun 1990-1997	63
4.1.1.3 Kredit UKM Tahun 1997-2004	64
4.1.2 Sektor Riil di Indonesia	66
4.1.2.1 Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia	66
4.1.2.2 Usaha Kecil dan menengah di Jawa Timur	70
4.1.2.3 Kontribusi UKM terhadap PDB dan tenaga kerja	72
4.2 Pembahasan	75
4.2.1 Permasalahan Kredit UKM di Jawa Timur	75
4.2.1.1. Permasalahan Kredit UKM dari Pihak UKM	75
4.2.1.2. Permasalahan Kredit UKM dari Pihak Perbankan	76
4.2.1.2.1. Prosedur Pemberian Kredit	78
4.2.1.2.2. Analisa 6C	83
4.2.1.2.3. Persyaratan Bank	87

4.2.1.2.4. Rigiditas Tingkat Suku Bunga	88
4.2.2. Kebijakan Bank Sentral Dalam mengatasi masalah	90
4.2.3. Keefektifan Kebijakan Bank Indonesia Dalam Mengatasi Masalah	97
Bab 5 Simpulan dan Saran	101
5.1. Simpulan	101
5.2. Saran	102
Daftar Kepustakaan	104
Lampiran	107



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Respon Terhadap Operasi Terbuka	16
Gambar 2.2 Pasar Keuangan	21
Gambar 2.3 Jasa Pasar Keuangan	23
Gambar 2.4 Bank Garansi	49
Gambar 4.1 Skema Permasalahan Kredit UKM	77



DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1.1	Indikator Utama Ekonomi Indonesia	4
Tabel 4.1	Posisi KUK Rupiah Bank Umum Menurut Daerah Tingkat I Jawa Timur 1997-2004 (Miliar Rp)	65
Tabel 4.2	Jumlah UKM di Indonesia 1997-2004 (unit)	67
Tabel 4.3	Posisi UKM Jawa Timur 2001-2004 (unit)	72
Tabel 4.4	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja UKM Jatim 2001- 2004 (orang)	73
Tabel 4.5	Kontribusi UKM terhadap PDRB Jatim 2001-2004 (triliun Rp)	74
Tabel 4.6	Posisi Kredit UKM Jatim 2002-2004 (Miliar Rp)	98
Tabel 4.7	Tingkat NPL Kredit UKM Jatim 2001-2004 (%)	99
Tabel 4.8	Distribusi Kredit UKM Jawa Timur 2001-2004 (Miliar Rp)	100

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah dan keanekaragaman masyarakat Indonesia secara langsung mengakibatkan aktivitas perekonomian negara kita beragam pula. Usaha keluarga yang semula hanya dapat memenuhi kebutuhan keluarga kini telah dapat menjadi sebuah usaha kecil dan menengah. Usaha tersebut sangat menarik perhatian pemerintah karena sebuah industri kecil yang semula hanya dikerjakan oleh sanak keluarga kini juga dapat menyerap tenaga kerja dari luar bahkan mampu mengekspor hasil usahanya ke beberapa negara.

Perekonomian Indonesia terdiri dari lapisan atas sektor riil yang diwakili oleh usaha besar atau industri sedangkan lapisan bawah diwakili oleh usaha kecil yang sekarang lebih dikenal dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan IKR (Industri Kerajinan Rakyat). Walaupun dengan jalan yang berbeda namun keduanya mempunyai peran yang besar sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, upaya pengembangan UKM dan IKR telah menjadi satu bagian dari sektor riil Indonesia yang telah lama diupayakan untuk menjadi salah satu prioritas bagi pemerintah dalam pembangunan ekonomi.

Terlebih lagi keadaan perekonomian Indonesia sejak tahun 1980-an mengalami peningkatan secara terus-menerus sehingga banyak investor luar negeri yang menanamkan investasinya di Indonesia dalam bentuk penanaman modal asing

PMA) yang akhirnya digunakan untuk pembangunan beberapa infrastruktur penting di Indonesia. Hal ini secara langsung memberikan efek yang positif terhadap pembangunan ekonomi Indonesia karena dengan dibangunnya beberapa industri baru maka secara tidak langsung akan membuka lapangan kerja yang baru. Dengan demikian diharapkan produktivitas kerja meningkat dan angka pengangguran di Indonesia dapat ditekan semaksimal mungkin.

Semakin banyaknya industri baru bermunculan mengakibatkan semakin banyak pula modal yang diperlukan untuk mendirikan industri-industri baru. Namun seiring dengan waktu pula modal yang tersedia dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan modal dalam negeri. Karena itulah banyak pengusaha yang meminjam modal dari luar negeri untuk mendirikan usahanya yang ada di Indonesia.

Namun di balik kemantapan perekonomian Indonesia, Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang multidimensi dan dapat meledak sewaktu-waktu. Terdapat beberapa bidang yang labil seperti besarnya utang luar negeri khususnya pinjaman luar negeri swasta, rapuhnya sistem perbankan, praktek KKN, serta kebijakan intervensi pemerintah yang menghambat pasar bebas.

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 tidak dapat dihindari oleh perekonomian Indonesia karena waktu jatuh tempo pembayaran utang luar negeri khususnya pihak swasta. Selain itu, inflasi menyebabkan nilai dollar naik tajam terhadap nilai rupiah.

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1998 sangat mempengaruhi sektor riil terutama usaha besar karena sebagian besar dari mereka mempunyai

pinjaman luar negeri yang pada saat krisis mengalami jatuh tempo pembayaran sehingga mereka tidak dapat melunasinya dan pada akhirnya gulung tikar. Saat itu, krisis menyerang banyak pihak terutama industri-industri besar yang sangat digantungkan oleh banyak rakyat Indonesia. Banyak pengusaha yang menutup usahanya karena tidak mampu membayar hutang luar negerinya atau tingginya biaya produksi (*high cost inflation*) yang harus ditanggungnya. Hal ini menyebabkan angka pengangguran meningkat tajam dan mengakibatkan rusaknya hampir seluruh formasi perekonomian Indonesia

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa sebenarnya perekonomian kita sangat lemah. Sehingga pada saat terkena tekanan yang hebat dari dollar, hampir semua sektor terkena imbasnya terutama industri-industri besar yang sebagian besar dana operasionalnya berasal dari pinjaman luar negeri yang tentunya dalam mata uang dollar. Naiknya tingkat inflasi menyebabkan PMA di Indonesia menurun drastis akibat banyaknya industri besar yang harus menutup usahanya. Sehingga pertumbuhan ekonomi tepat pada tahun 1998 mengalami penurunan yang sangat drastis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang terus mengalami peningkatan akibat kondisi *boom* pada tahun 1990-an

TABEL 1.1
INDIKATOR UTAMA EKONOMI INDONESIA 1990 - 1997

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Pertumbuhan Ekonomi (%)	7.24	6.95	6.46	6.5	7.54	8.22	7.98	4.65
Tingkat inflasi (%)	9.93	9.93	5.04	10.18	9.66	8.96	6.63	11.6
Neraca Pembayaran (US\$ juta)	2.099	1.207	1.743	741	806	1.516	4.451	-10.02
Neraca Perdagangan	5.352	4.801	7.022	8.231	7.901	6.533	5.948	12.964
Neraca berjalan	-3.24	-4.392	-3.122	-2.298	-2.96	-6.76	-7.801	-2.103
Neraca modal	4.746	5.829	18.111	17.97	4.008	10.59	10.989	-4.845
Pemerintah (neto)	633	1.419	12.752	12.75	307	336	-522	4.102
Swasta (neto)	3.021	2.928	3.582	3.216	1.593	5.907	5.317	-10.78
PMA (neto)	1.092	1.482	1.777	2.003	2.108	4.346	6.194	1.833
Cad devisa akhir tahun (US\$)	8.661	9.868	11.611	12.35	13.16	14.67	19.125	17.427
Debt Service ratio (%)	30.9	32	31.6	33.8	30	33.7	33	
Nilai tukar Des (Rp/US\$)	1.901	1.992	2.062	2.11	2.2	2.308	2.383	4.65
APBN* (Rp.milyar)	3.203	433	-551	-1.852	1.495	2.807	818	456

Sumber : Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF dan saran, 1998, BI

Krisis yang berkepanjangan tersebut menyebabkan merosotnya nilai tukar rupiah yang sangat tajam, akibat dari serbuan yang mendadak dan secara bertubi-tubi terhadap dollar AS dan jatuh temponya utang swasta luar negeri dalam jumlah besar. Seandainya tidak ada serbuan terhadap dollar AS ini, meskipun terdapat banyak distorsi pada tingkat ekonomi mikro, ekonomi Indonesia tidak akan mengalami krisis.

Dengan lain perkataan, walaupun distorsi pada tingkat ekonomi mikro ini diperbaiki, tetapi bila tetap ada gempuran terhadap mata uang rupiah maka krisis akan terjadi juga, karena cadangan devisa yang ada tidak cukup kuat untuk menahan gempuran ini. Krisis ini diperparah lagi dengan akumulasi dari berbagai faktor penyebab lainnya yang datangnya saling bersusulan. Besarnya defisit neraca berjalan dan utang luar negeri, ditambah dengan lemahnya sistem perbankan nasional sebagai akar dari terjadinya krisis finansial (Tarmidi, Lepi T, 1999 : 3)

Semakin memburuknya perekonomian nasional saat itu mengharuskan Bank Indonesia mengambil inisiatif untuk mengambil beberapa kebijakan moneter yang cenderung ketat. Namun secara umum, melemahnya nilai tukar rupiah terutama disebabkan oleh menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap prospek pemulihan perekonomian akibat faktor internal maupun eksternal.

Faktor internal yang menyebabkan melemahnya nilai rupiah adalah masih terbatasnya pasokan valuta asing di pasar sebagai dampak masih rendahnya arus modal yang masuk dan tidak sepenuhnya kembali memberikan *return* sebagai devisa ke dalam negeri. Sementara itu, tekanan permintaan terhadap valuta asing masih tinggi karena masih banyaknya utang yang jatuh tempo dan melambatnya proses restrukturisasi utang swasta.

Faktor eksternal yang mempengaruhi adalah turunnya suku bunga Fed dan menguatnya USD dalam skala global. Hal ini juga terjadi karena peran aktif para pelaku ekonomi dalam memperdagangkan rupiah di pasar dengan keadaan likuiditas

yang terbatas sehingga menyebabkan kondisi pasar valas tipis dan adanya peningkatan yang tajam dalam nilai tukar.

Ada salah satu sektor yang masih bertahan di tengah ambruknya perekonomian Indonesia yaitu sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Bahkan, sektor ini mampu melahirkan pelaku usaha yang memiliki daya tahan tinggi, kreatif, dan dapat bersaing baik di pasar lokal maupun pasar internasional. Sektor ini bertahan karena mereka tidak bergantung pada sumber daya dari luar tapi sepenuhnya pada sumber daya dalam negeri.

Sejak krisis melanda negeri ini pada pertengahan tahun 1997 hingga saat ini, diantara rontoknya konglomerat karena belitan utang, atau ketidakmampuan optimalisasi kapasitas produksinya karena sulitnya pasokan bahan baku yang harus diimpor, sebagian besar UKM justru tetap bertahan. Pengusaha di skala itu masih terus bergerak walau memikul beban yang lumayan berat dan tetap masih bisa berdiri dan berjalan. Bagi UKM yang memiliki kandungan lokal yang besar membuat kekuatannya untuk bertahan semakin besar. Mereka pun relatif mampu mencapai optimalisasi produksi.

Krisis ekonomi yang tidak mempengaruhi sektor UKM secara keseluruhan masih belum dapat memberikan kesadaran pada perbankan akan keberadaan UKM. Bahkan, beberapa kalangan masih mengabaikannya sebagai sektor usaha yang prospektif bagi perbankan. Padahal seharusnya pemerintah mamberikan perhatian lebih kepada UKM karena terbukti bahwa justru bank-bank yang berorientasi pada kredit UKM terselamatkan. Berbeda dengan bank-bank yang berorientasi pada

industri-industri besar saja yang dulu harus ditangani oleh BPPN (Badan Penyelamatan Perbankan Nasional) karena harus direstrukturisasi.

UKM telah menunjukkan eksistensinya dalam perekonomian nasional dengan berbagai kontribusi baik dari sisi mikro maupun makro namun belum pernah terangkat untuk lebih diperhatikan. Kesuksesan UKM dan berbagai pujian yang diberikan kepada UKM ternyata tidak berbanding lurus dengan kepedulian untuk mengangkat sektor UKM ke jenjang yang lebih tinggi dalam perekonomian nasional. UKM masih belum dipercaya sebagai sektor yang menjanjikan dan menguntungkan, setidaknya hal ini tampak pada rendahnya distribusi kredit kepada UKM.

Pada masa krisis kontribusi kegiatan ekspor terbesar diberikan oleh kelompok UKM. Lemahnya infrastruktur perbankan saat itu tidak membuat para pelaku UKM mendapat dampak negatifnya karena kekuatan modal kerja mereka tidak bergantung sepenuhnya pada lembaga perbankan. mereka mampu hidup dengan modal sendiri, kalau pun ada dukungan bank itu pun jumlahnya tidak besar. Prinsip sektor ini begitu fleksibel, sehingga mereka bisa ke luar masuk pasar lokal maupun ekspor lebih cepat. Kegiatan ekspor UKM terbanyak terjadi di sub sektor industri tekstil, produk tekstil, mebel, sepatu, mainan anak-anak, kerajinan kulit, rotan, dan sawit. Bahkan di Jawa Timur kontribusi UKM terhadap PDRB telah mencapai 52,73% dari semua sektor (Diskop PKM Jatim : 2005) sedangkan Pemerintah Daerah khususnya gubernur mengharapkan intermediasi perbankan dalam meningkatkan kredit UKM yang pada akhir tahun 2003 telah mencapai 59% dari keseluruhan kredit (Utomo S, Imam : 2004)

Sebagian besar usaha kecil dan menengah tersebut mengelola sumber daya yang telah ada dan berkembang sejak lama. Biasanya komoditi yang dihasilkan adalah produk yang bersifat tradisional. Sehingga UKM ini cepat berkembang karena berkaitan dengan kebudayaan negara kita yang diminati masyarakat luar negeri. Namun seiring dengan waktu, produk yang dihasilkan akhir-akhir ini tidak hanya produk tradisional saja tapi juga merambah bidang yang lain. Bahkan, beberapa dari UKM ini mampu mengekspor produknya.

Di balik semua perkembangan UKM yang ada di Indonesia, terdapat keterbatasan sumber daya yang dihadapi oleh dunia ini. Dan dalam mengatasi keterbatasan sumber daya tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia mempunyai pilihan kebijakan yang terfokus pada dua aspek, yaitu aspek penciptaan iklim usaha yang kondusif dan aspek pengembangan infrastruktur perekonomian yang mendukung kegiatan ekonomi.

Pada umumnya Usaha Kecil dan Menengah mempunyai karakteristik masih rendahnya akses terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang, perantara bahkan rentenir. Kondisi demikian merupakan peluang bagi bank untuk meningkatkan penyaluran kreditnya. Pemerintah dan perbankan hendaknya menyadari bahwa penyaluran kredit ke UKM penuh risiko mendesain berbagai regulasi untuk mempertahankan usaha bank. Berbagai regulasi di bidang perkreditan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh bank-bank umum dengan berbagai kebijakan. Misalnya persyaratan pejabat perkreditan (

The first line of defence), pedoman pemberian kredit (*the second line of defence*) serta membangun pilar-pilar pengaman lainnya (Suhardjono, 2002 : 3)

Apabila dibandingkan dengan usaha besar, UKM memberikan pendapatan (produktivitas peminjaman) yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah (lebih tahan terhadap gejolak ekonomi). Oleh karena itu, tidaklah mengherankan ketika terjadi krisis ekonomi, bank-bank yang membiayai usaha-usaha kecil justru mampu bertahan (kinerjanya lebih baik) dibandingkan dengan bank-bank yang membiayai usaha besar.

Perekonomian negara yang terkena krisis seperti Indonesia, faktor-faktor yang dapat menurunkan penawaran kredit perbankan dapat bersumber dari sisi internal dan eksternal bank. Secara internal, perbankan yang saat ini tengah berada dalam tahapan konsolidasi, tentu akan ekstra hati-hati sebelum memutuskan untuk memberikan kredit kepada dunia usaha. Terlebih lagi jika melihat betapa dunia usaha di Indonesia saat ini juga masih bergulat dengan berbagai permasalahannya sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pengalaman buruk masa krisis, dimana bank harus berhadapan dengan kredit macet yang hampir meruntuhkan perbankan Indonesia, berperan dalam mendorong sikap bank yang ekstra konservatif. Di samping itu, dalam tahap konsolidasi ini perbankan pada umumnya masih dihadapkan dengan berbagai kelemahan operasional maupun sistem internal kontrol. Untuk mengatasi hal ini, bank melakukan berbagai langkah seperti pengetatan prosedur pemberian kredit dan menerapkan *risk management* secara ketat.

Hal ini diperburuk lagi dengan adanya kesenjangan informasi (*assymetric information*), yakni kurangnya pengetahuan bank akan kondisi sebenarnya dari berbagai individu perusahaan. Akibatnya, banyak perusahaan yang layak dibiayai tidak memperoleh akses kredit bank semata-mata karena bank tidak memahami *nature* dari usahanya, atau karena bank tidak mengerti bahwa komoditi yang dihasilkan suatu perusahaan memiliki daya saing yang tinggi dan pasar yang baik secara internasional atau karena sebab-sebab lain yang terkait dengan kurangnya pengetahuan bank. Di sini kemampuan analisis kredit bank menjadi sangat *crucial*, agar mampu meningkatkan penyaluran kredit bank ke pihak ketiga tanpa mengorbankan kehati-hatian.

Kebijakan Bank Indonesia harus konsisten untuk terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap berbagai kebijakan perbankan, termasuk dengan semakin tegas dalam menangani bank yang bermasalah. Hal ini mendorong bank untuk semakin berhati-hati dengan cara antara lain melakukan penyesuaian atas portfolio asetnya termasuk dengan menambah penempatan pada aset yang lebih likuid dan berisiko rendah seperti SBI dan obligasi Pemerintah. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau aset portfolio sektor perbankan masih didominasi oleh penanaman dalam bentuk SBI dan surat-surat berharga. Dalam kondisi likuiditas yang berlimpah, dana perbankan nasional ternyata kebanyakan masih berputar-putar di sektor keuangan, bukan sektor yang riil dan produktif. Padahal, perbankan sendiri tidak bisa terus menerus bergantung kepada penyaluran kredit konsumsi dan penempatan di pasar uang sebagai sumber utama pendapatannya. Tanpa peningkatan

investasi yang dapat menciptakan peningkatan kesempatan kerja, lambat laun konsumsi masyarakat tentu turun karena karena penghasilannya yang menurun.

Di samping permasalahan internal bank, secara eksternal bank juga dihadapkan pada kondisi pasca krisis dimana perekonomian belum benar-benar bergairah kembali. Sebagai akibatnya, permintaan terhadap kredit bank juga relatif menurun. Secara mikro, diantara perusahaan-perusahaan yang berhasil bertahan setelah krisis, banyak yang sekarang masih melakukan konsolidasi, termasuk dengan cara mengurangi beban hutang. Kapasitas produksi yang terpasang belum optimal dimanfaatkan ketika pendapatan masyarakat masih rendah dan belum kembali seperti masa sebelum krisis, juga menjadi penyebab rendahnya permintaan investasi, sekaligus permintaan terhadap kredit bank. Bahkan, banyak perusahaan yang harus melakukan efisiensi dan rasionalisasi karena masih lesunya pasar.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat dipahami bahwa terdapat beberapa hal penting yang berkaitan dengan kredit UKM, sehingga dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana daftar permasalahan kredit UKM di Jawa Timur dari sisi supply ?
- 2) Bagaimana efektivitas kebijakan yang telah di ambil bank sentral dalam mengatasi permasalahan kredit UKM di Jawa Timur ?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana daftar permasalahan kredit UKM di Jawa Timur dari sisi supply
- 2) Untuk mengetahui efektivitas kebijakan bank sentral yang telah di ambil dalam mengatasi kredit UKM di Jawa Timur

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah :

- 1) Memberikan gambaran umum mengenai bagaimana kebijakan bank sentral mampu meningkatkan jumlah kredit UKM di Jawa Timur
- 2) Memberikan bahan pertimbangan bagi perbankan dalam mengimplementasi kebijakan bank sentral dalam pelaksanaan pemberian kredit UKM.
- 3) Memberikan sumbangan pikiran dan informasi bagi penelitian lanjutan yang mungkin dilakukan oleh peneliti berikutnya pada bidang yang sama.

1.5 Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah di dalam mendapatkan gambaran permasalahan skripsi, maka sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut :

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang skripsi berupa bertahannya sektor UKM di tengah ambruknya perekonomian Indonesia pada tahun 1997 akibat krisis

ekonomi, dan dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian yang seluruhnya terfokus pada pencarian solusi untuk memperbaiki kinerja perbankan dalam memberikan kredit UKM.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan secara terperinci teori-teori yang mendasari penulisan skripsi ini, antara lain tentang Ekonomi moneter, Sistem Keuangan, dan beberapa kebijakan BI mengenai kehati-hatian pemberian kredit UKM.

Bab III: METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari pendekatan penelitian yang menjelaskan pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam menyelesaikan penelitian, antara lain : pendekatan penelitian berupa pendekatan kualitatif, objek penelitian berupa skema permasalahan pemberian kredit UKM, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis.

Bab IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas permasalahan yang dihadapi secara skematis dengan menjelaskan tentang gambaran umum permasalahan pemberian kredit UKM terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan deskripsi hasil penelitian serta analisisnya sebelum membahas permasalahan lebih lanjut.

Bab V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai simpulan hasil pembahasan secara menyeluruh serta saran yang dipandang perlu untuk implementasi maupun penelitian selanjutnya.

BAB 2

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan teori

2.1.1 Kebijakan moneter

Kebijakan moneter merupakan salah satu alat / instrumen bank sentral dalam mengendalikan perekonomian dalam negeri. Sedangkan pengertian kebijakan moneter adalah manajemen penawaran uang dan tingkat suku bunga (Mishkin, 2003 : 12). Sedangkan menurut Hubbard dalam bukunya yang berjudul *Money, the Financial System, and the Economy* menyatakan bahwa kebijakan moneter adalah manajemen penawaran uang dan hubungannya dengan harga, tingkat suku bunga, dan variabel ekonomi lainnya. Kebijakan moneter dapat disebut juga sebagai upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar (Prathama R & Mandala M, 2001 : 359)

Kebijakan moneter dilakukan bank sentral yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dan menjaga kestabilan jumlah uang beredar yang beredar di masyarakat. Selain itu, kebijakan ini dikeluarkan agar para investor, pengusaha, atau mahasiswa yang tertarik dengan bidang ini dapat memprediksikan perubahan dalam penawaran uang dan efeknya pada variabel lain (Hubbard, 2002 : 9)

Apabila pemerintah menambah jumlah uang beredar maka dapat dikatakan pemerintah menjalankan kebijakan moneter ekspansif (*monetary expansive*).

Sebaliknya apabila pemerintah mengurangi jumlah uang yang beredar maka dapat dikatakan pemerintah menjalankan kebijakan moneter kontraktif (*monetary contractive*) atau istilah lainnya adalah kebijakan uang ketat (*tight money policy*)

2.1.1.1 Instrumen Kebijakan Moneter

Menurut Mishkin, ada tiga alat / instrumen yang digunakan oleh bank sentral dalam menjaga kestabilan nilai tukar yaitu Operasi pasar terbuka (*Open Market Operations*), Fasilitas diskonto (*discount policy*), Cadangan wajib (*reserve requirement*).

Operasi pasar Terbuka (*Open market Operations*) adalah salah satu instrumen kebijakan dengan membeli atau menjual obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah secara terbuka dalam pasar uang. (Mishkin, 2003 : 439). Bank Sentral menjual obligasi-obligasi (*government securities*) tersebut apabila ingin mengurangi jumlah uang yang beredar namun pembelian obligasi-obligasi tersebut akan mengakibatkan jumlah uang beredar bertambah.

Di Indonesia, operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Jika ingin mengurangi jumlah uang beredar, pemerintah menjual SBI sehingga uang yang ada dalam masyarakat ditarik. Penjualan SBI ini dilakukan bila jumlah uang beredar dianggap telah mengganggu stabilitas perekonomian.

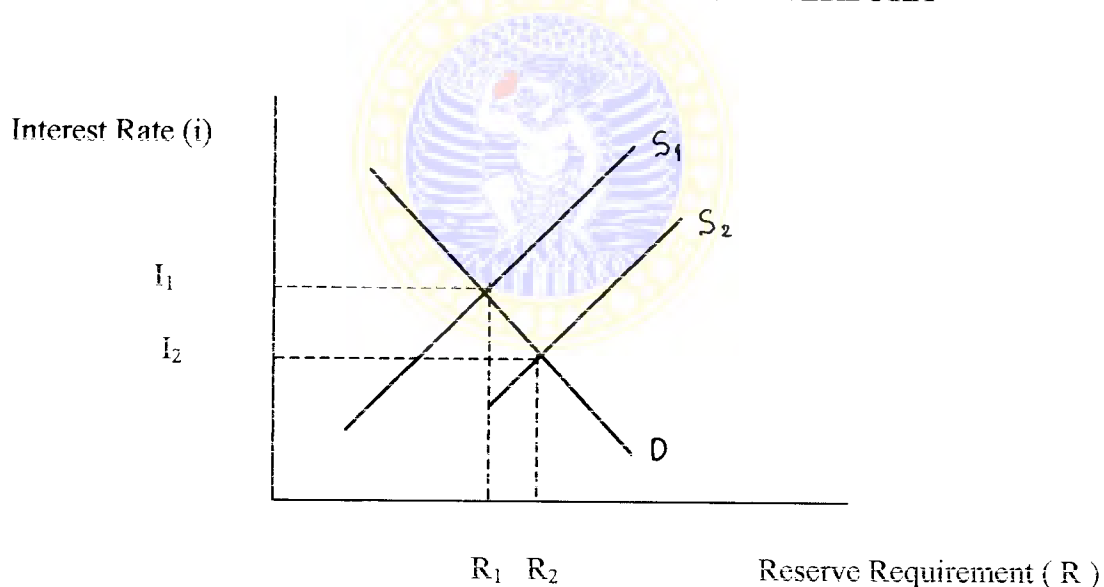
Apabila pemerintah melihat jumlah uang beredar perlu ditambah agar perbankan lebih mampu memberikan kredit yang akan memacu pertumbuhan

ekonomi maka SBI yang telah dijual akan dibeli kembali. Melalui pembelian SBI ini pemerintah mengeluarkan uang sehingga menambah jumlah uang beredar.

Selain itu, instrumen yang satu ini juga memberikan efek yang berbeda terhadap tingkat suku bunga. Apabila pemerintah membeli obligasi tersebut, tingkat suku bunga akan turun (kebijakan moneter kontraktif). Sebaliknya apabila pemerintah menjual obligasi-obligasi tersebut maka tingkat suku bunga akan meningkat (kebijakan moneter ekspansif)

GAMBAR 2.1

RESPON TERHADAP OPERASI PASAR TERBUKA



Sumber : Dikutip dari Mishkin, Frederich R, 2003, *The Economics of Money, Banking, And Financial Market, sixth edition*, Pearson education Internasional

Fasilitas diskonto (*discount policy*) adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang meminjam ke bank sentral (Prathama R &

Mandala M, 2001 : 361). Karena dalam kondisi tertentu bank-bank umum mengalami kekurangan uang sehingga mereka harus meminjam kepada bank sentral.

Mekanisme ini mampu mempengaruhi kuantitas pinjaman dan penawaran uang. Ada tiga tipe politik diskonto yang ditawarkan. Yang pertama adalah kredit yang disesuaikan (*adjustment credit*) yaitu kredit yang diberikan bank sentral kepada bank umum untuk memenuhi kekurangan likuiditasnya dalam jangka pendek dengan menggunakan tingkat suku bunga dasar yang telah ditetapkan.

Kedua adalah kredit musiman (*seasonal credit*) yaitu kredit yang diberikan kepada bank umum yang melayani kredit untuk proyek yang bersifat musiman. Sebagai contoh adalah kredit pertanian sehingga sejak tahun 1992 bank sentral memberikan tingkat suku bunga dasar dan bersifat bulanan.

Ketiga adalah kredit yang dapat diperkirakan (*extended credit*) yaitu kredit yang diberikan kepada bank yang kekurangan likuiditas akibat *outflow* dari nasabah yang terlalu besar. Dalam hal ini pinjamannya bersifat jangka panjang sehingga bank harus mengajukan proposal dalam aplikasi kreditnya terlebih dahulu kepada bank sentral sebelum mendapat pinjaman. Suku bunga yang ditetapkan adalah 1,5 % diatas tingkat suku bunga *adjustment credit* (Miskhin, 2003: 442-443).

Menurut Hubbard dalam bukunya *Money, the Financial system and the Economy* ada dua keuntungan yang diperoleh oleh bank sentral dalam memberikan fasilitas ini kepada bank-bank umum. Yang pertama adalah sebagai *lender of the last resort*, karena dalam hal ini apabila keadaan suatu negara mengalami krisis, bank sentral melalui fasilitasnya ini dapat membantu bank-bank yang mengalami kesulitan

likuiditas karena pada saat itu kemungkinan sebagian besar bank terkena imbasnya sehingga dia harus meminta bantuan bank sentral sebagai *lender of the last resort*.

Kedua adalah memberi tanda akan maksud kebijakan bank sentral atau bisa juga disebut sebagai alat untuk memberitahu kepada para pelaku ekonomi tentang keadaan perekonomian suatu negara dengan melihat naik atau turunnya suku bunga pinjaman yang ditetapkan oleh bank sentral kepada bank umum (*announcement effect*). Apabila bank sentral menambah jumlah uang beredar maka bank sentral akan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman. Dengan tingkat suku bunga pinjaman yang lebih murah maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi bertambah besar. Sebaliknya apabila bank sentral ingin menahan laju pertumbuhan jumlah uang beredar maka pemerintah akan menaikkan bunga pinjaman . Hal ini akan mengurangi keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari bank sentral sehingga penambahan jumlah uang beredar dapat ditekan.

Cadangan wajib (*Reserve requirement*) adalah kebijakan bank sentral dalam penetapan cadangan wajib minimal yang harus disimpan oleh bank didalam bank sentral yang mempengaruhi penawaran uang karena adanya perubahan multiplikasi penawaran uang (Mishkin, 2003 : 449). Peningkatan cadangan wajib dapat mengurangi jumlah deposito dan akan meningkatkan kontraksi pada penawaran uang karena mengurangi multiplikasi penawaran uang. Sebaliknya apabila terjadi penurunan cadangan wajib maka mengakibatkan ekspansi pada penawaran uang dan turunnya tingkat suku bunga.

Instrumen yang ketiga ini merupakan suatu otoritas moneter bank sentral dan merupakan alat yang efektif dalam mempengaruhi penawaran uang dan tingkat suku bunga. Bahkan sejak 1930 Fed sering menggunakan cadangan wajib ini sebagai alat untuk menjaga stabilitas penawaran uang dan tingkat suku bunganya.

Namun alat yang ketiga ini mempunyai kelemahan yaitu apabila bank sentral menaikkan cadangan wajib dan ada bank yang tidak dapat memenuhinya dan hal ini dapat mengacaukan manajemen bank tersebut karena ketidakpastian bank sentral dalam menentukan waktu dari perubahan cadangan wajib karena bank sentral dapat melakukannya sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu ada satu hal lagi yang dapat mempengaruhi bank sentral dan bank umum dalam menyikapi tiga alat kebijakan moneter tersebut yaitu Imbauan Moral (*Moral Persuasion*). Dengan imbauan moral ini otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang beredar. Misalnya, gubernur BI dapat memberikan saran agar perbankan berhati-hati dengan kreditnya atau membatasi keinginan untuk meminjam uang dari bank sentral.

2.1.2 Sistem Keuangan

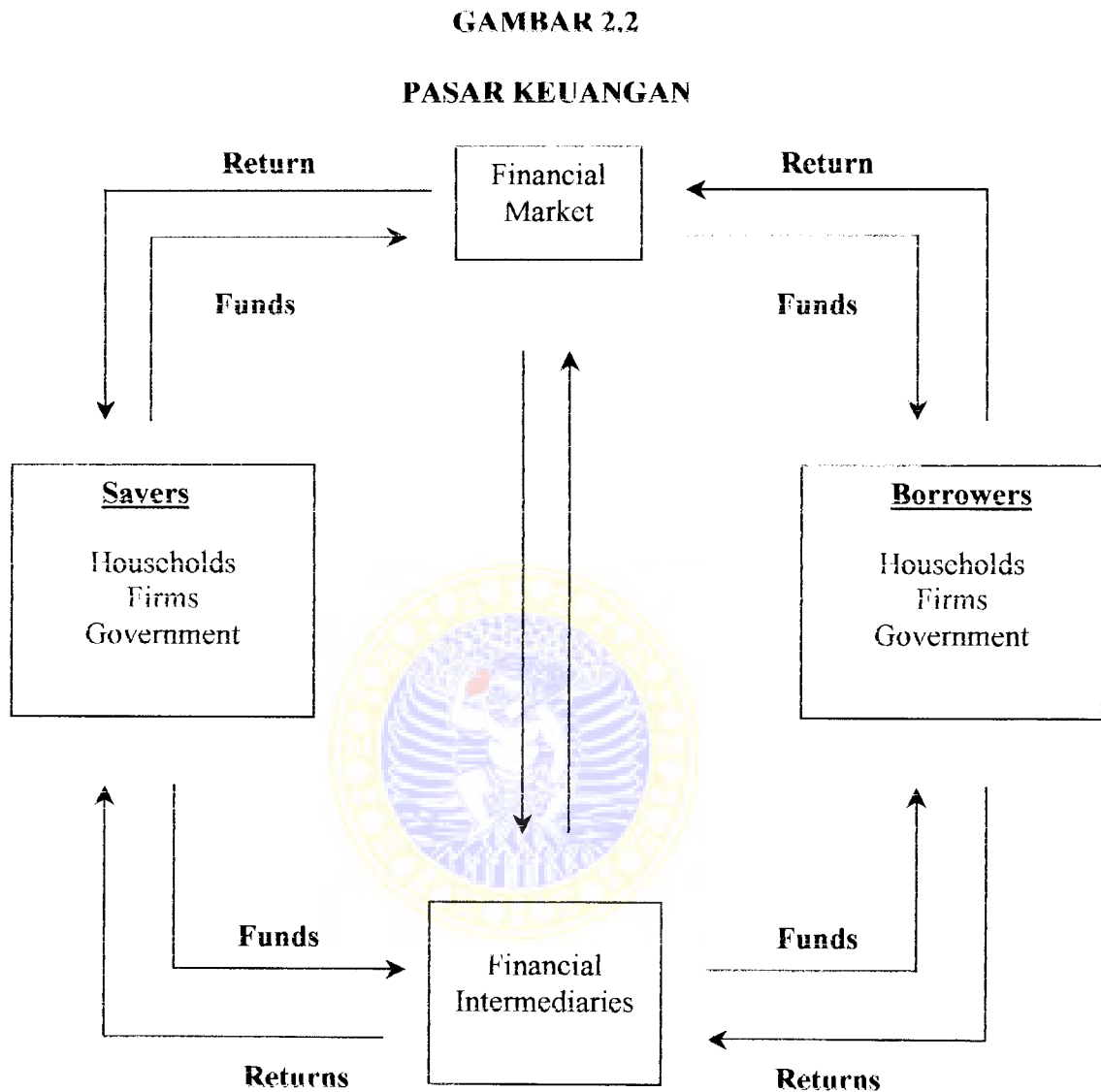
Sistem Keuangan (*Financial System*) adalah sebuah jaringan dari suatu pasar atau institusi yang mempertemukan *savers* (pihak yang menyimpan uang / kelebihan dana) dengan *borrowers* (pihak yang meminjam dana / kekurangan dana). Dalam sistem keuangan pihak surplus dapat menyimpan dananya dalam bentuk tabungan,

membeli obligasi atau membeli saham. Ada tiga kelompok potensial penyimpan dana dalam sistem keuangan yaitu rumah tangga, pengusaha, dan pemerintah.

Pihak yang kelebihan dana (*savers*) maupun pihak yang membutuhkan dana (*borrowers*) dapat memanfaatkan sistem keuangan karena mereka masing-masing mendapatkan keuntungan yang berupa *return* dari sistem keuangan. Pihak *borrowers* dapat menggunakan dana dari *savers* secara produktif sampai pihak *savers* membutuhkan dananya.

Savers / Lenders adalah penyuplai dana, menyediakan dana untuk pihak *borrowers* dengan imbal jasa berupa *return* yang harus dibayar oleh pihak *borrowers* di masa mendatang. *Borrowers* adalah peminta dana yang harus membayar kembali dana tersebut berdasarkan kesepakatan ditambah bunga yang harus dia bayar. Sehingga dalam hal ini sistem keuangan menyediakan *channel* untuk mentransfer dana dari individu / grup yang menyimpan dana kepada individu / grup yang ingin meminjam uang.

Gambar 2.2 menjelaskan bahwa pasar uang (*financial market*) seperti pasar saham atau obligasi yang mempertemukan antara pihak *savers* dengan pihak *borrowers*. Sedangkan perantara keuangan (*financial intermediaries*) seperti bank dan asuransi adalah sebagai perantara dalam jual beli surat berharga atau aset lainnya antara pihak *savers* dengan pihak *borrowers*.



Sumber : Dikutip dari Hubbard. R. Glenn, 2002, *Money the Financial System and the Economy*, fourth edition, Boston, Pearson Education,inc.

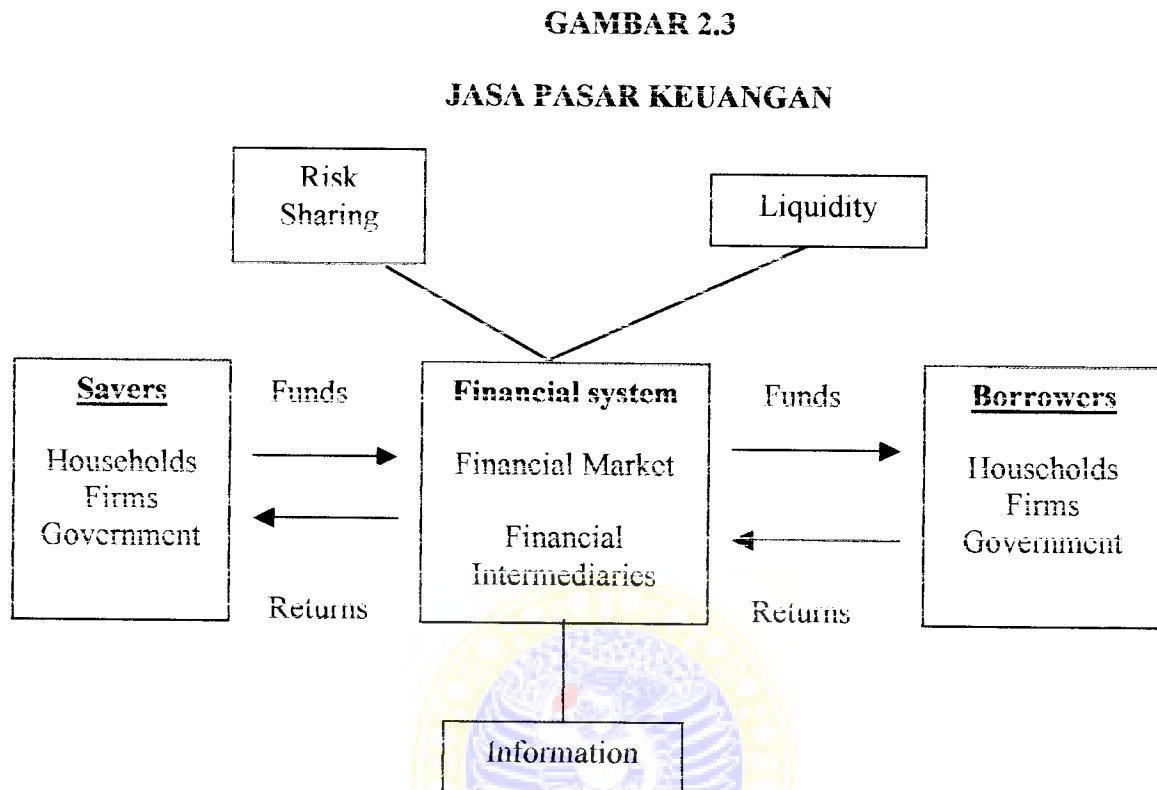
Sistem keuangan menyediakan tiga kunci jasa keuangan yaitu *risk sharing* (pembagian risiko), *liquidity* (likuiditas), dan *infomation* (pemberian informasi). Risiko adalah derajat ketidakpastian dari sebuah tingkat pengembalian aset. Kebanyakan orang tidak berani menduga lebih jauh tentang tabungan mereka dan

mencari tingkat pengembalian yang aman secara keseluruhan. Ketika mereka meminjam dana, mereka juga menginginkan biaya peminjamannya dapat diprediksikan perubahannya. Oleh karena itu, sistem keuangan menyediakan *risk sharing* dengan memberikan beberapa cara kepada *savers* dan *borrowers* untuk mengurangi ketidakpastian yang tidak mereka harapkan.

Kedua, kebanyakan orang menginginkan aset mereka dengan cepat dapat diuangkan. *Liquidity* adalah sebuah pengukuran bagaimana kecepatan suatu aset dapat dirupakan menjadi uang. Seperti apabila seseorang menanamkan semua uangnya dalam bentuk tanah maka akan sulit baginya untuk menguangkannya karena tanah sulit untuk dijual. Oleh karena itu, sistem keuangan menyarankan untuk menyimpan dananya dalam aset yang *liquid* (mudah diuangkan) seperti tabungan, saham, atau obligasi.

Ketiga adalah informasi, dalam hal ini sistem keuangan menyediakan dan menghubungkan antara *savers* dan *borrowers* dengan memberikan informasi kepada pihak *savers* supaya *savers* tidak mengalami kesulitan dalam mencari *borrowers* yang berprospek bagus. Sistem keuangan mengalokasikan dana secara efisien untuk mengurangi biaya informasi dalam menghubungkan *savers* dan *borrowers*.

Dapat disimpulkan bahwa sistem keuangan mempertemukan *savers* dan *borrowers* serta menyediakan pembagian risiko, likuiditas, dan jasa informasi melalui dua penyalurnya yaitu pasar uang dan perantara keuangan.



Sumber : Dikutip dari Hubbard. R. Glenn, 2002, *Money the Financial System and the Economy*, fourth edition, Boston, Pearson Education,inc.

2.1.3 Bank

2.1.3.1 Definisi Bank

Sebagaimana dikutip dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992 yang telah diubah dalam undang-undang No. 10 tahun 1998 menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa bank merupakan suatu lembaga yang berfungsi menjadi intermediasi antara pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam

bank dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya.

Hubbard dalam bukunya *Money, The financial System and the Economy* mengungkapkan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang menerima dana dari pihak surplus (pihak kelebihan dana) dan menciptakan kredit bagi pihak defisit (pihak yang membutuhkan dana). Sedangkan menurut sumber lain menyatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan dan menciptakan kredit serta merupakan suatu perantara bagi kebanyakan orang yang membutuhkan hal yang berada di bawah kewenangan bank yaitu asosiasi kredit, simpanan (tabungan) dan sebagainya. (Miskhin, 2003 :8)

Sedangkan definisi bank menurut UU No. 23/1999, bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku. Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga atau tempat yang menjalankan kegiatan, perputaran uang, dan lalu lintas pembayaran. Selain itu, bank juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Suhardjono, 2003 : 3)

2.1.3.2 Jenis-Jenis Bank

Jenis atau bentuk bank bermacam-macam tergantung pada cara penggolongannya. Penggolongan tersebut dapat dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1) Jenis bank menurut formalitas berdasarkan undang-undang

Berdasarkan pasal 5 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan terdapat dua jenis bank, yaitu :

a) Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi, BPR adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dapat disamakan dengan bentuk tersebut.

2) Jenis bank berdasarkan kepemilikannya

a) Bank milik Negara (Badan Usaha Milik Negara atau BUMN)

yaitu Bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan karena itu bank ini juga sering disebut sebagai bank pemerintah. Dalam

kegiatan usahanya bank-bank ini tidak jauh berbeda dengan bank-bank lainnya. Tingkat keterlibatan pemerintah dalam manajemen bank terbatas hanya dalam penunjukan dan pengangkatan direksi dan dewan pengawas sesuai dengan ketentuan perundangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Saat ini bank BUMN berjumlah empat bank yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Nasional (BTN), dan Bank Mandiri

b) Bank milik Pemerintah Daerah (BUMD)

yaitu bank-bank pembangunan daerah yang pendiriannya didasarkan pada Undang-Undang No. 13 tahun 1962. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, BPD-BPD tersebut harus memilih dan menetapkan bentuk badan hukumnya, menjadi Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah. Jumlah Bank Pembangunan daerah di Indonesia saat ini berjumlah 27 bank yang terletak di 27 provinsi.

c) Bank milik Swasta Nasional

yaitu bank yang berbadan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Apabila dilihat dari lingkup usahanya, bank swasta nasional dapat dibedakan menjadi dua yaitu bank devisa (*foreign exchange bank*) dan bank non devisa . Bank Devisa adalah bank yang dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi dalam bentuk valuta asing, setelah

mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, antara lain menerima simpanan dan memberikan kredit dalam valuta asing termasuk jasa-jasa keuangan yang terkait dengan valuta asing, misalnya *letter of credit*, *travelers checks*. Sedangkan bank nondevisa adalah bank yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan valuta asing

d) Bank milik swasta campuran (Nasional dan Asing)

yaitu bank yang berbadan hukum Indonesia yang sebagian besar atau kecil modalnya dimiliki oleh pihak asing dan sisanya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

e) Bank milik asing (cabang atau perwakilan)

Bank ini merupakan kantor cabang dari suatu bank di luar Indonesia yang saat ini hanya diperkenankan beroperasi di Jakarta dan membuka kantor cabang pembantu di beberapa ibukota provinsi selain Jakarta yaitu, Surabaya, Semarang, Bandung, Denpasar, Ujung Pandang , Medan, dan Batam. Sejak awal tahun 1970-an, bank asing tidak diizinkan membuka kantor cabang di Indonesia namun sejak pertengahan tahun 1999 diberi kesempatan kembali untuk membuka kantor cabangnya dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Bank asing yang dapat membuka cabangnya tersebut harus termasuk bank yang memiliki aset 200 terbesar dunia dan memiliki rating minimal A dari lembaga peringkat (*rating agency*) internasional. Hingga saat ini jumlah bank asing yang beroperasi di Indonesia berjumlah 10 bank yaitu, Citibank, American Express Bank,

Bank of Tokyo, Standard Chartered Bank, Hongkong and Shanghai Bank, Deutsche Bank, ABN-Amro Bank, Bank of America, Chase Manhattan Bank, dan Bangkok Bank

3) Jenis bank berdasarkan penekanan kegiatannya

- a) Bank Retail (*Retail bank*)
- b) Bank Korporasi (*Corporate Bank*)
- c) Bank Komersial (*Commercial bank*)
- d) Bank Pedesaan (*Rural Bank*)
- e) Bank Pembangunan (*Development Banks*)
- f) dan lain-lain

4) Jenis bank berdasarkan pembayaran bunga atau pembagian hasil usaha

- a) Bank Konvensional
- b) Bank berdasarkan prinsip Syariah

2.1.3.3 Produk Bank

Bank menyediakan beberapa alternatif produk yang dapat dipilih oleh nasabah sesuai dengan kebutuhannya. Produk bank dibagi menjadi dua macam yaitu,

a) Produk bank pada sisi pasiva

Produk bank pada sisi pasiva adalah pengerahan dana. Dana-dana yang termasuk produk bank pada sisi pasiva adalah :

1) Giro

Giro adalah simpanan dari pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan

2) Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut ketentuan atau syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau lainnya yang dapat disamakan dengan itu.

3) Deposito

Deposito adalah simpanan pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.

Deposito dapat dibedakan menjadi :

3.1 Deposito berjangka

yaitu deposito yang dibuat atas nama dan tidak dapat dipindahtangankan.

3.2 Sertifikat deposito

yaitu deposito yang diterbitkan atas unjuk dan dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan serta dapat dijadikan sebagai jaminan bagi permohonan kredit

3.3 Deposits on call

yaitu sejenis deposito berjangka yang pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, asalkan memberitahukan bank dua hari sebelumnya.

b) Produk Bank pada sisi Aktiva

Produk bank pada sisi aktiva adalah perkreditan dan macam-macamnya adalah :

1) Kredit Modal kerja

yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah kredit (debitur) untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan debitur

2) Kredit Investasi

yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah kredit (debitur) untuk membiayai pembelian barang modal (investasi)

3) Kredit-kredit program

yaitu berbagai jenis kredit yang diberikan bank dalam rangka memenuhi ketentuan untuk mengikuti suatu program pemerintah misalnya kredit candak kulak (KCK), kredit usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM),

2.1.3.4 Fungsi Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan tiga fungsi utama bank, yaitu :

- Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan
- Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit
- Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang

Berdasarkan hal di atas dapat dilihat bahwa penyaluran kredit merupakan salah satu fungsi utama bank dan salah satu hal yang perlu diketahui bahwa kredit merupakan bagian terbesar dari aset bank dan pendapatan bank sebagian berasal dari pendapatan bunga kredit yang dikurangi bunga simpanan. Kondisi demikian bukan saja monopoli di Indonesia bahkan di negara-negara maju, kredit yang diberikan oleh pihak bank rata-rata mencapai 60-70% dari jumlah aktiva.

2.1.4 Bank Umum

2.1.4.1 Definisi Bank Umum

Menurut pasal 1 Undang-undang no 10 tahun 1998, Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu yang lebih luas. Selain itu, juga dapat dikatakan bahwa bank umum adalah grup terbesar dari lembaga penyimpanan yang menawarkan pembagian risiko

(*risk sharing*), likuiditas (*liquidity*), dan pemberian informasi (*information services*) yang menguntungkan bagi pihak surplus dan pihak defisit (Hubbard, 2002 : 299).

2.1.4.2 Usaha Bank Umum

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No. 10 tahun 1998. usaha Bank Umum meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan bentuk lainnya yang disamakan dengan itu
2. Memberikan kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, yaitu
 - Surat-surat wesel
 - Surat pengakuan hutang
 - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 - Obligasi
 - Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun
 - Surat berharga lain berjangka waktu sampai satu tahun
5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
11. (dihapus)
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat
13. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pendapat lain menyatakan bahwa terdapat enam usaha bank umum dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari (Dendawijaya, 2000 : 33), yaitu :

a. Perkreditan

Perkreditan merupakan bagian terbesar dari aset bank dan pendapatan bank yang sebagian berasal dari pendapatan bunga kredit yang dikurangi bunga simpanan (*spread*).

b. Pemasaran (*Marketing*)

Kegiatan pemasaran (*Marketing*) bank umum lebih banyak diarahkan pada penghimpunan dana. Hal ini dikarenakan semua kegiatan bank umum pada sisi aktiva seperti pemberian kredit, penanaman dalam surat berharga , penanaman dalam penyertaan pada suatu perusahaan serta penempatan dana pada bank lain, sangat tergantung pada adanya dana yang dapat dihimpun oleh bank umum yang jumlahnya dapat dilihat pada sisi pasiva dalam neraca bank.

c. Pendanaan (*Treasury*)

Kegiatan pendanaan (*treasury*) lebih diutamakan pada pengelolaan dana oleh para eksekutif bank. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh kinerja yang optimal dalam memperoleh dana serta memaksimalkan alokasi dana kepada aktiva produktif

d.Operasional (*Operations*)

Kegiatan operasional (*Operations*) adalah kegiatan unit-unit dalam bank yang bersifat membantu kegiatan-kegiatan unit utama lainnya.

e. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (*Human Resources*)

Pengelolaan sumber daya manusia (*human resources*) dalam bank mencakup seluruh siklus di bidang sumber daya manusia yang diharapkan mampu

memberikan kontribusi yang optimal dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dalam bank.

2.1.5 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

2.1.5.1 Definisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Berdasarkan pasal 1 undang-undang no 10 tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu juga dapat dikatakan bahwa bank perkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Siamat, 2004 : 29).

2.1.5.2 Usaha BPR

Berdasarkan pasal 13 undang-undang No. 10 tahun 1998 menyatakan bahwa usaha bank perkreditan rakyat meliputi :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- Memberikan kredit

- Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain

2.1.6 Kredit

2.1.6.1 Definisi

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani “ Credere “ yang berarti kepercayaan atau berasal dari bahasa latin “ Creditum “ yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Pengertian tersebut dibakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkan Undang-Undang Pokok perbankan No. 14 tahun 1967 bab 1 pasal (1,2) yang merumuskan kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.

Berdasarkan pasal 1 undang-undang No. 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dapat dikatakan bahwa definisi di atas dapat memberikan konsekuensi bagi bank dan peminjam mengenai hal-hal berikut (Siamat, 2004 : 165) :

- Penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu oleh bank (*kreditur*)
- Kewajiban debitur mengembalikan kredit yang diterimanya
- Jangka waktu pengembalian kredit
- Pembayaran bunga
- Perjanjian kredit

Pengertian kredit di atas menegaskan bahwa terdapat beberapa prinsip yang dapat dipetik dan disimpulkan bagi bank dan pihak peminjam dalam melaksanakan perjanjian kredit, yaitu :

1. Prinsip kepercayaan

Hal ini ditandai dengan adanya suatu penyerahan uang dari pemberi kredit kepada peminjam atau penyediaan fasilitas keuangan dari pemberi kredit kepada peminjam atau penyerahan tagihan dari peminjam kepada pemberi kredit yang menimbulkan tagihan dari peminjam kepada pemberi kredit yang menimbulkan tagihan kepada pihak lain, dengan harapan bahwa pemberi kredit (bank) akan mendapatkan bunga sebagai pendapatan dari pemberian kredit (bank).

2. Prinsip Perjanjian

Hal ini menandakan bahwa pemberian kredit didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai bahwa kedua belah pihak akan mematuhi hak dan

kewajibannya masing-masing. Kemudian penerapan prinsip ini dilakukan dengan cara bahwa perjanjian kredit harus dilakukan secara tertulis dan dipertegas dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pada penjelasan pasal 8 ayat (2), yaitu “ Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis”.

3. Prinsip Kesepakatan

Kesepakatan dari pemberi kredit dan peminjam tentang jangka waktu bagi pelunasan hutang dan bunga yang akan diselesaikan dalam jangka waktu yang akan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Selanjutnya penerapan prinsip ini dilakukan dengan mencantumkan seluruh hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian kredit, jumlah kredit, beserta ketentuan-ketentuan pengembalian, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh debitur, ketentuan penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan, dan sebagainya. Semua itu harus dicantumkan dengan jelas dalam perjanjian kredit dan masing-masing pihak secara jelas mengerti isi perjanjiannya. Perjanjian dibuat dalam dua rangkap satu untuk debitur dan satu untuk kreditur. Dengan keduanya menerima asli akta perjanjian, diharapkan keduanya mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian

Keterangan di atas menjelaskan bahwa kredit merupakan rangkaian kegiatan utama bank umum. Hal ini didasarkan pada kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Kredit merupakan kegiatan / aktivitas yang terbesar dari perbankan

2. Besarnya angka pos kredit yang diberikan dalam neraca (pada sisi aktiva) merupakan angka yang terbesar dalam neraca bank.
3. Penghasilan terbesar bank diperoleh dari bunga, provisi, komisi, *commitment fee*, *appraisal fee*, dan lain-lain yang diterima sebagai akibat dari pemberian kredit bank.
4. Risiko terbesar yang dipikul oleh bank berasal dari kegiatan pemberian kredit, bentuknya bermacam-macam, seperti :
 - Risiko *spread*, yang timbul sebagai akibat hasil negatif antara selisih biaya bunga (yang harus dibayar kepada deposan atau nasabah penyimpan dana) dan tingkat bunga kredit (yang diterima dari nasabah kredit)
 - Risiko kredit bermasalah, yang timbul sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban nasabah kredit untuk membayar angsuran pinjaman atau bunga kredit pada waktu yang sudah disepakati antara pihak bank dengan nasabah (debitur) kredit
 - Risiko nilai jaminan, yang timbul sebagai akibat turunnya nilai jaminan (agunan) yang dipegang bank dibandingkan dengan jumlah nilai sisa pinjaman (*outstanding*) yang masih harus dilunasi oleh nasabah kredit
 - Risiko kurs valuta asing, yang timbul sebagai akibat kenaikan nilai kurs valuta asing terhadap mata uang lokal (rupiah) sehingga nasabah kredit tidak memiliki dana (dalam valuta asing) yang cukup memadai yang disebabkan oleh pendapatan nasabah dalam valuta lokal

5. Kegiatan ini pada suatu bank umum merupakan kegiatan yang paling banyak memiliki struktur organisasi dan beragam sifatnya. Sebagai contoh, direktur kredit membawahi berbagai divisi atau bagian kredit yang dibedakan berdasarkan :

- Jenis kredit (kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha kecil, kredit candak kulak, kredit ekspor, kredit perkebunan, kredit profesi, dan sebagainya)
- Jenis nasabah (kredit korporasi / perusahaan dan kredit perorangan)
- Jenis valuta (kredit dalam rupiah dan kredit dalam valas)
- Jenis program (kredit ekspor dan kredit kelayakan usaha)
- Jenis bantuan (kredit likuidasi, fasilitas diskonto, dan lain-lain)

2.1.6.2 Klasifikasi Kredit Perbankan

Perkreditan bank sudah demikian berkembang dan beraneka ragam jenisnya, sehingga untuk mempelajarinya diperlukan pemahaman yang memadai tentang klasifikasi kredit bank. Pengelompokan jenis-jenis kredit dalam bisnis perbankan sangat terkait dengan tujuan pengelompokan itu sendiri.

1. Pengelompokan Kredit Menurut Cara penarikannya

a Pinjaman rekening Koran

Pinjaman yang diberikan bank kepada nasabahnya dengan batas *plafond* yang sudah ditetapkan. Nasabah menarik pinjaman sesuai dengan kebutuhannya.

Bunga yang dibayar hanya untuk jumlah pinjaman yang benar-benar telah ditariknya.

b. Pinjaman persekoi

Pinjaman yang penarikannya dilakukan sekaligus pada saat realisasi. Sedangkan pelunasannya dilakukan angsuran secara bulanan atau musiman yang besarnya telah ditetapkan menurut suatu cara perhitungan tertentu.

2. Pengelompokan kredit Berdasarkan ciri dan tujuan penggunaan

a. Kredit Modal Kerja

Fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai aktiva lancar atau menggantikan hutang dagang, serta membiayai sementara kegiatan operasional rutin perusahaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

b. Kredit Investasi

Fasilitas kredit yang diberikan untuk membantu pembiayaan pemohon dalam memperoleh barang modal selain tanah yang tercermin dalam aktiva tetap perusahaan.

c. Kredit Konsumtif

Kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan konsumtif yang diperlukan pemohon dan sumber pembayaran kembali kreditnya berasal dari penghasilan / gaji pemohon.

- d. Kredit Transaksi khusus
Fasilitas kredit yang hanya sekali pakai yang disetujui untuk satu tujuan atau beberapa tujuan tertentu.
- e. Kredit tidak Langsung
Kredit yang tidak memerlukan disposisi dana secara langsung pada saat kredit tersebut disetujui.

3. Pengeompokan Kredit berdasarkan Cara Pelunasan

- a. Kredit dengan angsuran tetap merupakan kredit konsumtif yang dalam angsuran tetap tersebut telah dimasukkan angsuran untuk pokok dan bunga. Dengan demikian setelah angsuran dilakukan dalam frekuensi tertentu, kreditnya akan lunas.
- b. Kredit dengan *plafond* menurun secara periodik pada umumnya ditujukan untuk kredit-kredit jangka panjang.
- c. Kredit dengan *plafond* tetap pada umumnya ditujukan untuk kredit modal kerja yang berjangka waktu pendek, misalnya satu tahun

4. Pengeompokan kredit berdasarkan besarnya kredit

- a. Kredit Usaha Kecil
Kredit atau pembiayaan dari bank untuk investasi atau modal kerja yang diberikan dalam rupiah atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan *plafond* kredit keseluruhan maksimum Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif.

b. Kredit Menengah

Kredit yang besarnya diatas Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 miliar, yang sumber pembayaran kembali kreditnya berasal dari *cashflow* usaha / perorangan.

c. Kredit Besar

Kredit yang besarnya lebih dari Rp 50 miliar yang sumber pembayaran kembali kreditnya berasal dari *cashflow* usaha dan pada umumnya yang mengambil kredit ini adalah pengusaha-pengusaha besar.

5. Pengelompokan Kredit Berdasarkan Jangka Waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit yang diberikan kepada calon debitur dengan jangka waktu paling lama satu tahun yang pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Fasilitas kredit yang diberikan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, namun kurang atau sama dengan tiga tahun.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit yang diberikan kepada calon debitur dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun yang pada umumnya dipergunakan untuk membiayai kebutuhan investasi calon debitur.

6. Pengelompokan Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi

a. Kredit sektor pertanian, perkebunan, dan sarana pertanian

b. Kredit sektor pertambangan

- c. Kredit sektor perindustrian
- d. Kredit sektor ekonomi listrik, gas, dan air
- e. Kredit sektor ekonomi konstruksi
- f. Kredit sektor ekonomi perdagangan, restoran, dan hotel
- g. Kredit sektor ekonomi pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi
- h. Kredit sektor ekonomi jasa-jasa dunia usaha
- i. Kredit sektor ekonomi jasa-jasa sosial / masyarakat
- j. Kredit sektor ekonomi lain-lain

2.1.7 Kredit UKM

2.1.7.1 Definisi Kredit UKM

Kredit usaha kecil dan menengah terdiri dari dua pengertian yaitu kredit usaha kecil dan kredit usaha menengah. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3 / 9 / Bkr tahun 2001, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mempunyai kriteria sebagai berikut :

- Kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- Memiliki hasil penjualan bersih tahunan paling banyak Rp 1 juta
- Milik warga negara Indonesia

- Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar
- Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi

Jenis-jenis usaha yang mempunyai kriteria seperti di atas, oleh Bank Indonesia dikelompokkan sebagai kegiatan usaha yang perlu dibantu dengan Kredit Usaha Kecil (KUK). Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah kredit atau pembiayaan dari bank untuk investasi atau modal kerja yang diberikan dalam rupiah atau valas kepada nasabah usaha kecil dengan *plafond* kredit keseluruhan maksimum Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif, yaitu usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa.

Pengertian usaha menengah seperti yang dikutip dalam warta ekonomi nomor 49 tanggal 3 Mei 1993 yaitu kegiatan usaha yang mempunyai omset penjualan diatas Rp 1 miliar sampai dengan Rp 100 miliar setahun. Sedangkan berdasarkan kesepakatan bersama Menko Kesra selaku Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan dengan Gubernur Bank Indonesia tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (No. 11 / KEP / MENKO / KESRA / IV / 2002 – No. 4 / 2 / KEP.GBI / 2002 tanggal 22 April 2002) tersebut pengertian kredit usaha menengah adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha di luar usaha mikro dan usaha kecil atau kepada pengusaha yang

kriterianya akan ditetapkan kemudian, dengan *plafond* diatas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000,00. Dengan definisi yang terakhir ini akan membatasi gerak bank dalam memberikan kredit UKM, karena nilai kredit usaha menengah dirasakan sangat kecil, sementara beberapa bank dibatasi dalam ekspansi kredit usaha skala besar.

2.1.7.2 Jenis-Jenis Kredit UKM

a) Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja adalah fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan yang pada umumnya berjangka waktu pendek, maksimal satu tahun. Sedangkan pengertian modal kerja adalah sejumlah dana yang dipergunakan untuk membiayai operasional perusahaan mulai dari pengadaan bahan baku / penolong / bahan setengah jadi, membiayai tenaga kerja, proses produksi barang sampai dengan barang tersebut dijual atau dengan kata lain sejumlah dana / kas yang tertanam dalam aktiva lancar yang dipergunakan untuk menjalankan aktivitas perusahaan.

b) Kredit Investasi

Kredit Investasi merupakan fasilitas kredit yang ditujukan untuk pembiayaan aktiva tetap dan berjangka waktu panjang yang pada umumnya lebih dari satu tahun. Kredit Investasi dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Investasi baru, yang merupakan kegiatan investasi untuk proyek baru atau pembuatan sistem produksi baru untuk proyek perluasan

- Investasi peremajaan, merupakan kegiatan investasi untuk penggantian peralatan lama
 - Dan sebagainya
- c) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan oleh bank dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan konsumtif debitur yang didasarkan pada kemampuan debitur dalam mengangsur pokok dan bunga dari pendapatan bersih yang diterimanya. Ada banyak jenis kredit konsumtif yang ditawarkan bank, namun demikian berdasarkan sumber pelunasan kredit dapat dibedakan menjadi kredit kepada pegawai berpenghasilan tetap (Kretap), kredit kepada dana pensiunan (kresun), kretap kredit, dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan penggunaannya dapat dibedakan menjadi Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), kredit multiguna, kredit Pemilikan Sepeda Motor (KPM), dan sebagainya.

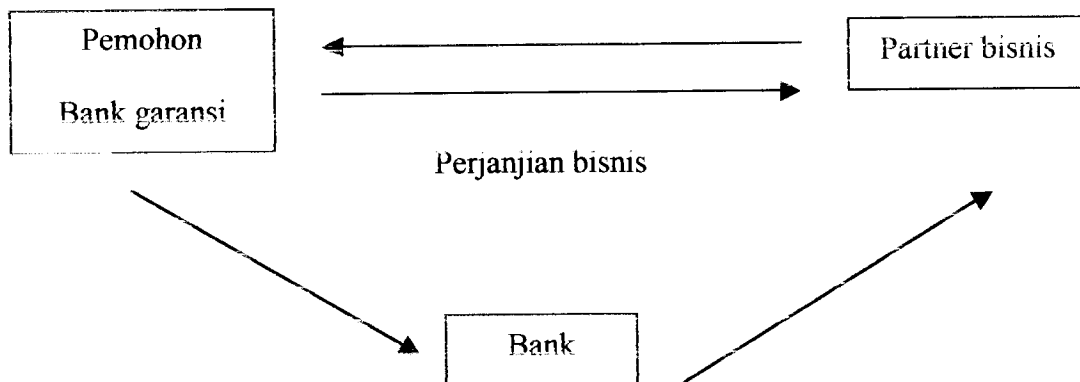
- d) Kredit Ekspor dan Impor

Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) adalah fasilitas KMKE yang diberikan kepada eksportir / pemasok yang disediakan untuk membiayai seluruh atau sebagian kegiatan produksi, pengumpulan, dan atau penyimpanan barang dalam rangka ekspor. Sedangkan Kredit Impor adalah fasilitas kredit untuk membiayai seluruh atau sebagian kegiatan dalam rangka impor barang, khususnya yang berhubungan dengan L / C impor yang dibuka oleh *opening bank* (bank yang menerbitkan L / C)

e) Kredit Jaminan Kas dan Bank Garansi

Kredit jaminan kas adalah kredit yang seluruhnya dijamin dengan agunan berupa kas (*fully cash collateralized*) atau hanya sebagian saja jaminannya berupa kas (*partially cash collateralized*). Sedangkan bank garansi adalah fasilitas yang diterbitkan oleh bank dengan maksud bahwa bank menjamin akan membayar kewajiban pemohon bank garansi apabila pemohon bank garansi melakukan wanprestasi terhadap pihak yang menjadi partner bisnisnya. Bank Garansi merupakan jenis kredit tidak langsung yang artinya kredit yang tidak memerlukan disposisi secara langsung pada saat kredit tersebut disetujui. Contoh bank garansi adalah Aksep, jaminan pelaksanaan (*performance bond*), dan garansi pengapalan (*shipping guarantee*).

GAMBAR 2.4
BANK GARANSI



Sumber : Dikutip dari Suhardjono, 2003, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta, UPP AMP YKPN

2.2 Penelitian Sebelumnya

Permasalahan kredit UKM di Indonesia pada tahun ini sedang banyak dibahas oleh banyak media dan ekonom. Hal ini tidak dapat dihindari karena memang UKM telah membuktikan eksistensinya di Indonesia bahkan pada saat krisis pun pada tahun 1998. Hal ini sangat menarik perhatian para ekonom dan ahli untuk meneliti lebih dalam tentang kelebihan UKM terutama saat-saat ini sebagai roda penggerak awal bagi sektor riil perekonomian kita. Hal ini dituangkan para ahli dalam beberapa artikel yang dimuat di media massa sehingga memberikan inspirasi bagi penulis untuk melihat lebih jauh masalah perkreditan UKM.

Artikel yang pertama ditulis oleh A Prasetyantoro yang berjudul “ Kondisi Perkreditan Perbankan Kita” yang dimuat pada harian Kompas edisi tanggal 19 Oktober 2003. Artikel memaparkan pendapatnya tentang perbankan kita yang masih

enggan dalam menyalurkan kredit UKM, hal ini dapat dilihat dari lambatnya pertumbuhan kredit tersebut tiap tahun. Kedua adalah artikel yang ditulis oleh M Fajar Maria yang berjudul “ Kala Perbankan lepas dari bayangan krisis “ yang dimuat harian Kompas pada edisi tanggal 8 November 2004. Artikel ini memaparkan pendapatnya tentang beberapa permasalahan yang dihadapi oleh perbankan dalam menyalurkan kredit dan kredit macet tentunya. Yang ketiga ditulis oleh M Fajar Maria juga yang berjudul “ Jaring Pengaman Keuangan bagi Usaha Mikro “ yang dimuat harian Kompas edisi tanggal 6 Desember 2004. Dalam artikel ini ia memaparkan pendapatnya tentang perlunya Jaringan Pengaman Keuangan (JPK) bagi usaha mikro sehingga mereka akan merasa terjamin dalam mengembangkan usahanya karena adanya JPK ini. Yang keempat adalah artikel yang ditulis oleh Djoko Retnadi yang berjudul “ Fungsi Perbankan Nasional dalam Mendorong Penerapan Investasi pada UKM “. Artikel ini memaparkan pendapatnya tentang perlunya kredit bagi UKM dan beberapa solusi bagi perbankan untuk mengatasi permasalahan penyaluran kredit kepada UKM.

Beberapa pendapat yang telah disebutkan di atas hanya membahas secara tidak menyeluruh dan terkesan tidak mencakup permasalahan sesungguhnya yang dihadapi oleh perbankan dalam menyalurkan kredit bagi UKM . Hal ini merupakan hal yang dilematis bagi perbankan dalam menyalurkan kredit tersebut.

Lingkungan akademis dari beberapa mahasiswa juga membahas hal yang menyerupai dengan penelitian ini. Namun beberapa hal yang harus dilihat dari tulisan-tulisan yang telah ada, hanya membahas perkembangan perkreditan saja dan

tidak membahas permasalahan sebenarnya dan bagaimana pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini pemerintah dan perbankan mengatasi hal ini.

Salah satu skripsi yang pernah ada adalah karya dari Denicy Adi Purwanto pada tahun 2001 yang berjudul “ Analisis Kredit Usaha Kecil Era Kebijakan Ekonomi Ketat “ (April 1994 - Maret 1996 dengan Juli 1997 – juni 1999). Skripsi ini memaparkan tentang perkembangan beberapa kredit usaha kecil pada era tersebut dengan menelitinya satu-persatu berdasarkan angka.

Penelitian ini lebih memaparkan seberapa besar peran kredit yang diberikan kepada UKM. Dan selain itu, penulis akan memberikan sebuah skema yang menggambarkan tentang permasalahan yang banyak dihadapi oleh perbankan dan hal itu masih sulit untuk dipecahkan karena dalam beberapa penelitian kebanyakan yang dibahas adalah kesulitan yang dihadapi oleh UKM sedangkan kesulitan perbankan dalam menyalurkan kredit itu sendiri belum dibahas secara menyeluruh sehingga baik perbankan bahkan pemerintah sulit untuk memberikan pemecahan akan masalah tersebut.

Penelitian ini menggunakan sebuah skema permasalahan yang dihadapi oleh perbankan dan penulis akan memaparkan hal tersebut satu-persatu. Permasalahan yang dihadapi oleh perbankan bersifat eksternal dan internal namun hal tersebut merupakan sesuatu yang pasti dihadapi perbankan dalam penyaluran kreditnya.

Selain itu, penulis akan membahas bagaimana efektivitas beberapa kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dan dalam hal ini Bank Indonesia sangat berperan dalam memperkecil permasalahan yang dihadapi

oleh perbankan. Disini kita akan melihat seberapa jauh peran Bank Indonesia dalam memecahkan masalah yang sebenarnya telah lama terjadi dan jarang untuk dibicarakan. Satu hal yang perlu diperhatikan pula kita akan membahas bagaimana bank-bank sekarang berusaha untuk berbondong-bondong dalam memberikan kredit UKM.

Dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini kita akan membahas sebuah mata rantai yang seharusnya tidak terputus. Penelitian dimulai dari beberapa permasalahan yang timbul dari pihak perbankan dan bagaimana Bank Indonesia menyikapi permasalahan tersebut melalui beberapa kebijakannya dan akhirnya bagaimana implementasi kebijakan sehingga beberapa bank pada akhir-akhir ini berusaha untuk menyalurkan kredit kepada UKM.

2.3 Model Analisis

Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga dalam hal ini yang dibahas adalah permasalahan yang diangkat peneliti berdasarkan realita yang ada dan perkembangan yang ada di Jawa Timur sejak terjadinya krisis yaitu tahun 1997 hingga tahun 2004. Dengan tren perkembangan kredit dan *Non Performing Loan* (NPL) yang terus menurun pada kedit UKM tiap tahun merupakan satu hal menarik untuk diangkat oleh peneliti dan dibahas secara lanjut sehingga akan mampu memberikan sedikit ruang terbuka untuk lebih mendalami permasalahan yang ada.

Analisis masalah akan dipaparkan secara sistematis mulai dari permasalahan yang timbul hingga bagaimana pemerintah berusaha untuk memecahkannya agar

kredit ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan UKM di Jawa Timur pada khususnya. Peneliti memilih daerah Jawa Timur agar lebih fokus pada permasalahan dan tidak terkesan melebar atau meluber pada permasalahan lainnya. Hal ini sangat perlu karena dengan demikian akan lebih terlihat permasalahan sesungguhnya yang dihadapi oleh perbankan Jawa Timur terutama dalam melayani kredit bagi UKM.



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian, terdapat dua metode yang dapat digunakan yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif.

Dalam hal ini peneliti mengembangkan konsep permasalahan yang telah disusun, menghimpun fakta, dan melakukan observasi. Sehingga dalam membahas permasalahan terdapat gambaran yang jelas untuk memastikan bahwa solusi yang didapatkan mampu meminimalisasi permasalahan yang timbul.

Pendekatan kualitatif yang digunakan akan menggunakan beberapa variabel sebagai petunjuk dan pedoman agar penelitian tidak fokus dan melebar. Hal ini sangat diperlukan sehingga pembatasan masalah mampu memberikan jalan keluar dan mempermudah dalam melakukan analisis. Dan dengan melakukan penelitian secara deskriptif akan memudahkan peneliti dalam melihat perkembangan suatu masalah dalam batasan tertentu dari waktu ke waktu seiring urutan waktu.

Obyek penelitian ini yaitu kredit UKM yang akan dilihat dari beberapa teori ekonomi dalam peranannya di perekonomian suatu negara dan bagaimana Bank Indonesia sebagai otoritas moneter melalui kebijakannya mampu mengungkap keberadaan kredit UKM ini dalam mempengaruhi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, peneliti memilih batasan waktu dari tahun

1997 hingga tahun 2004 karena pada tahun 1997 adalah tahun munculnya krisis moneter di Indonesia yang menyebabkan kondisi perekonomian kita porak-poranda terutama pada sektor riil. Dan pada saat itulah dapat kita lihat bagaimana perkembangan kredit UKM di Indonesia yang merupakan salah satu penunjang utama dalam pengembangan UKM tersebut sehingga sedikit demi sedikit akan mampu menggerakkan sektor riil di Indonesia dan memberikan kontribusi yang penting bagi negara kita melalui perekrutan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Selain itu, peneliti memilih batasan wilayah yaitu Jawa Timur bukannya Indonesia agar lebih fokus dan karena di Jawa Timur terdapat banyak UKM-UKM yang telah mampu memberikan kontribusi penting bagi perekonomian daerah.

Penelitian ini akan melihat bagaimana perkembangan UKM di Jawa Timur serta membandingkannya dengan perkembangan kredit yang telah tersalurkan bagi UKM tersebut sehingga akan terlihat kesenjangan yang terjadi dan permasalahan yang timbul akibat kesenjangan tersebut. Kemudian membandingkan jumlah kredit yang diberikan kepada usaha besar dan kepada UKM pada periode tersebut sehingga akan terlihat bagaimana perbankan dalam memprioritaskan penyaluran kredit pada periode tersebut. Setelah itu akan dilihat bagaimana kontribusi yang diberikan oleh UKM-UKM yang ada di Jawa Timur dalam pengadaan tenaga kerja dan memberikan kontribusi bagi PDB Jawa Timur. Sehingga dalam hal ini akan muncul permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perbankan dalam menyalurkan kredit UKM dan melihatnya satu persatu agar penelitian ini mampu mengungkap permasalahan sebenarnya yang terjadi selama periode tersebut. Kemudian permasalahan yang lain adalah bagaimana Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menyikapi permasalahan yang terjadi antara UKM dan perbankan melalui kebijakannya dan keefektifan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia akan dilihat dari perkembangan

kredit yang terlihat dari tahun ke tahun dari segi sektoral dan berdasarkan daerah atau wilayah.

3.2 Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dan yang mempunyai hubungan atau relevansi dengan permasalahan yang diteliti dari berbagai sumber tertulis. Data sekunder tersebut diantaranya berasal dari sumber buku dan literatur ilmiah, Laporan-Laporan tahunan Bank Indonesia, Laporan-Laporan tahunan BPS, Laporan tahunan Departemen Koperasi dan PKM, artikel-artikel dari berbagai jurnal dan media massa serta beberapa literatur yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam meneliti permasalahan yang timbul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan, yaitu kegiatan mempelajari dan mengumpulkan literatur-literatur yang mempunyai hubungan dan mempunyai konsep permasalahan yang hampir sama dengan skema permasalahan yang akan digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memecahkan masalah yang timbul dalam penelitian ini
2. mencari data dari berbagai pihak yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang terjadi dan para ahli yang bersangkutan sehingga dapat memberikan saran dan masukan kepada peneliti untuk mendukung data-data sekunder yang telah didapatkan oleh peneliti sehingga data-data yang ada

benar-benar mampu memberikan kontribusi yang tepat dalam membantu memecahkan permasalahan yang timbul dalam periode tersebut

3.4 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang data sekundernya merupakan pendukung dalam melakukan analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi adanya masalah-masalah yang timbul dalam perbankan dengan adanya penyaluran kredit yang diberikannya kepada UKM
2. Meneiaah bagaimana masalah-masalah yang timbul tersebut dipecahkan oleh perbankan itu sendiri dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter melalui kebijakan-kebijakannya pada periode tersebut.
3. Menganalisis setiap pemasalahan yang timbul pada perbankan sehingga nantinya akan ada beberapa alternatif penyelesaian untuk setiap permasalahan dengan melihat realita yang terjadi pada periode tersebut.
4. Mengevaluasi setiap alternatif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan apakah dengan alternatif tersebut perbankan akan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya ataukah Bank Indonesia harus memberikan solusi yang baru dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul pada perbankan agar penyaluran kredit dari perbankan kepada UKM akan sesuai dengan perkiraan Bank Indonesia dan dapat menjadi salah satu pendukung perkembangan UKM di Jawa Timur.
5. Simpulan ditarik berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan sebelumnya dan saran diberikan baik untuk implementasi selanjutnya maupun untuk penelitian selanjutnya

Tahun 1997 dipilih sebagai awal tahun penelitian karena sebagaimana diketahui bahwa pada triwulan ketiga tahun itu, Indonesia mengalami krisis moneter yang menghancurkan sektor riil negara kita dan perbankan tentunya. Dan pada saat usaha-usaha besar tersebut mengalami kebangkrutan dan kehancuran, namun usaha kecil dan menengah yang ada di Indonesia justru bertahan dan tidak terkena imbas oleh karena krisis yang terjadi tersebut. Hal ini perlu dipertanyakan dan disadari oleh pemerintah kita bahwa perekonomian khususnya sektor riil kita masih terselamatkan karena adanya usaha ini. Sejak saat itu, perbankan kita mengalami ketakutan dalam menyalurkan kredit baik dalam jumlah besar maupun kecil karena takut terjadinya kredit macet seperti yang terjadi pada saat krisis (*credit crunch*) sehingga menyebabkan banyak bank yang harus dilikuidasi akibat keuangan likuiditas saat itu.

Kompleksnya permasalahan yang terjadi dalam perbankan tentunya menimbulkan suatu efek yang buruk terhadap perekonomian kita karena apabila kredit tidak tersalurkan maka sektor riil kita juga tidak akan bergerak. Jika dilihat secara *general*, peran pemerintah dan Bank Indonesia sangatlah penting dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh perbankan kita.

Data sekunder yang telah dikumpulkan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas sehingga data-data tersebut dapat menerjemahkan keadaan sebenarnya yang terjadi di sektor riil dan perbankan kita. Akhirnya mampu memberikan sebuah kontribusi dalam memecahkan masalah-masalah yang timbul pada perbankan dalam menyalurkan kredit UKM.

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel-variabel dasar yang nantinya akan membantu dalam memecahkan permasalahan yang rumit dan kompleks tersebut. Variabel-variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain sebagai sebuah indikator dalam menyelesaikan analisis dalam penelitian ini, antara lain :

1. Jumlah UKM, yang memperlihatkan perkembangan UKM dari tahun ke tahun sejak tahun 1997 hingga tahun 2004. Sehingga akan terlihat bagaimana pesatnya perkembangan UKM di Jawa Timur pada khususnya dan dengan demikian dilihat perkembangan sektor riil di Jawa Timur dari tahun ke tahun dan akan mencerminkan perkembangan perekonomian yang terjadi di Jawa Timur karena peningkatan jumlah UKM yang ada di Jawa Timur.
2. Tingkat suku bunga kredit merupakan salah satu indikator penting bagi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor riil. Hal ini menyangkut dengan keuntungan yang akan didapatkan oleh perbankan dengan menyalurkan dananya kepada sektor riil. Hal ini merupakan faktor eksternal perbankan karena besarnya tingkat suku bunga sangat berkaitan dengan kebijakan Bank Indonesia saat itu sehingga seharusnya BI harus berhati-hati dengan setiap kebijakan yang dibuatnya karena secara langsung mempengaruhi besarnya tingkat suku bunga kredit yang ditawarkan perbankan kepada sektor riil.
3. Perkembangan kredit UKM merupakan salah satu indikator penting dalam melihat perkembangan sektor riil kita karena dengan semakin besarnya ekspansi kredit yang dilakukan oleh perbankan maka kemungkinan besar semakin meningkat pula kinerja sektor riil di suatu daerah atau sektor dan apabila dari tahun ke tahun volume kredit mengalami peningkatan mencerminkan bahwa kebijakan Bank Indonesia yang dibuat telah efektif dan mempunyai efek yang baik untuk perkembangan sektor riil.
4. Tingkat *Non Performing Loan* (NPL) kredit UKM, yang mencerminkan seberapa besar kredit macet yang terjadi dibandingkan dengan besarnya total kredit yang disalurkan oleh perbankan. Semakin kecil NPL dari tahun ke tahun

mencerminkan sektor riil kita semakin naik kinerjanya namun apabila NPL terus-menerus naik dari tahun ke tahun maka mencerminkan kinerja sektor riil memburuk karena besarnya kredit macet sektor riil yang terjadi pada perbankan.

5. Kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang memperlihatkan seberapa besar kontribusi atau pemasukan bagi daerah yang diberikan oleh UKM terhadap suatu daerah. Semakin besar perkembangan yang terjadi pada UKM menyebabkan semakin besar pula kontribusi yang diberikan kepada PDB namun sebaliknya apabila kinerja UKM pada daerah tersebut buruk maka kontribusinya terhadap dari tahun ke tahun akan menurun
6. Kontribusi terhadap penyerapan Tenaga Kerja yang memperlihatkan seberapa besar kontribusi UKM terhadap penyerapan tenaga kerja terutama sejak tahun 1997 pada saat terjadi krisis dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia. Dengan berkembangnya UKM di Jawa Timur pada khususnya sedikit demi sedikit mampu mengurangi jumlah pengangguran yang ada akibat PHK tersebut

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kredit Usaha Kecil di Indonesia

4.1.1.1 Kredit Usaha Kecil sebelum tahun 1990

Sebelum tahun 1990, kredit Usaha Kecil atau yang pada saat itu disebut kredit mikro merupakan salah satu pendorong yang diandalkan para pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Dalam hal ini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter berupaya untuk melakukan beberapa usaha melalui kebijakan-kebijakannya untuk mendorong perbankan dalam mengembangkan kredit mikro. Bahkan, Bank Indonesia mengeluarkan Fasilitas Bank Indonesia yang memberikan tambahan likuiditas bagi bank-bank yang memberikan kredit mikro yang diupayakan dapat dinikmati oleh para pengusaha kecil, antara lain : petani, nelayan, usaha kerajinan rakyat, dan lainnya.

Sejak tahun 1983, pemerintah secara konsisten melakukan berbagai upaya deregulasi sebagai upaya penyesuaian struktural dan rekonstruksi perekonomian. Kendati demikian, banyak yang mensinyalir deregulasi di bidang perdagangan dan investasi tidak memberikan keuntungan bagi pengusaha kecil dan menengah, bahkan justru perusahaan besar dan konglomerat yang mendapat keuntungan.

Industri Kecil dan Rumah Tangga (IKRT) yang merupakan awal lahirnya UKM setidaknya mempunyai alasan untuk ditumbuhkembangkan yaitu IKRT

yang menyerap banyak tenaga kerja dan kecenderungan ini juga berlaku pada pemakaian sumber daya alam lokal. Apalagi karena lokasinya banyak di pedesaan, pertumbuhan IKRT memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan angka kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi

Hal ini berlangsung di berbagai wilayah Indonesia sehingga pada periode tersebut terjadi ekspansi kredit yang besar. Hal ini dikarenakan pada tahun 1983, Bank Indonesia mengeluarkan Paket 1 Juni 1983 (Pakjun 1983). Deregulasi Pakjun 1983 berisikan tiga hal yang isinya antara lain :

- a) Menghapus pagu kredit sehingga bank-bank nasional dapat memberikan kredit secara lebih leluasa sesuai dengan kemampuannya dengan harapan bank dapat berkembang secara wajar.
- b) Bank diberi kebebasan menentukan sendiri suku bunga deposito, tabungan, maupun suku bunga kredit dalam rangka meningkatkan mobilisasi dana dari dan kepada masyarakat.
- c) Mengurangi sebanyak mungkin atau meniadakan ketergantungan bank-bank kepada bank sentral (Bank Indonesia) dengan cara mengurangi / meniadakan kredit likuiditas

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pada periode tersebut bank-bank benar-benar memanfaatkan kebijakan tersebut untuk berbagai macam kredit termasuk kredit skala mikro yang pada saat itu permintaannya tinggi. Dan selama periode tersebut terdapat beberapa program perkreditan yaitu :

- a) Program Kredit Industri Kecil (KIK)
- b) Program KUPeDES bagi masyarakat pedesaan yang dilayani BRI melalui 3200 unit desa
- c) Program Pusat Pelayanan Kredit Koperasi Pedesaan (PPKKP) yang dilayani BUKOPIN melalui sekitar 150 KUD dan sekitar 1600 kelompok simpan pinjam
- d) Proyek Percontohan Pengembangan Penyempurnaan Kredit CandaK Kulak (P4KCK) yang dilayani KUD atas bimbingan Departemen Koperasi
- e) Program kredit kecamatan yang dilayani dari beberapa Bank Kredit Kecamatan

4.1.1.2 Kredit Usaha Kecil tahun 1990-1997

Pada periode tersebut, BPR banyak berperan dalam menyediakan kredit skala kecil kepada pengusaha. Kebanyakan BPR memilih daerah pinggiran kota dan berusaha untuk berinteraksi secara dekat dan insentif dengan masyarakat yang dilakukan dari tingkat rumah atau kios secara satu persatu. Namun dibalik itu, masih ada kelemahan yaitu margin bunga yang diambil masih tinggi dan pelayanan pendampingan masih terbatas hanya berasal dari LSM serta profesionalisme perbankan pada beberapa LSM masih lemah.

Bank Indonesia bekerjasama dengan GTZ Jerman mengenalkan Proyek Kredit Mikro (PKM). PKM disalurkan melalui lembaga-lembaga kredit pedesaan (LDKP) seperti BKK (Badan Kredit Kecamatan), BKD (Badan Kredit Desa), dan

sebagainya (Suhardjono, 2003 : 59). Selain itu, karena perkembangan yang begitu pesat, UU yang telah berlaku sejak 1967 harus direvisi dan diganti dengan UU yang baru hingga diberlakukannya UU Nomor 7 tahun 1992 yang dimaksudkan agar kemajuan yang dialami oleh perbankan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaksanaan pembangunan nasional.

Selain Bank Indonesia, beberapa bank juga mengembangkan kredit mikronya melalui produk-produk perbankannya. BRI melayani masyarakat pedesaan dengan penyaluran KUPEDES yang merupakan kredit bagi pengusaha mikro dengan persyaratan mudah, efisien dan tepat di tingkat kecamatan, kota, dan desa. BUKOPIN bekerjasama dengan RABO Bank Belanda mengembangkan program kredit yang disalurkan melalui KUD Mandiri. Dan adanya kelompok, sistem tanggung renteng dan penyaluran yang sangat memperhatikan kebutuhan pengusaha berhasil mengurangi masalah risiko kemacetan. BII (Bank Internasional Indonesia) melakukan pendekatan integratif dengan menciptakan koperasi dan pemberian kredit dari bank formal untuk memotong jaringan usaha daur ulang yang ada.

4.1.1.3 Kredit UKM Tahun 1997-2004

Penyaluran Kredit UKM pada awal periode ini menunjukkan perkembangan yang tidak begitu menggembirakan. Hal ini terjadi karena krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 dan menyebabkan bank-bank tidak melakukan ekspansi

kredit seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun kondisi ini mulai membaik setelah tahun 1998 dan hal ini dapat dilihat pada data terlampir.

Tabel 4.1

Posisi Kredit Usaha Kecil Rupiah Bank Umum Menurut Daerah Tingkat I Jawa Timur 1997-2004 (Milir Rp)

TAHUN	NILAI KREDIT
1997	7572
1999	4881
2000	6879
2001	8666
2002	9871
2003	10870
2004	12261

Sumber : Statistika Ekonomi dan Keuangan Daerah Jawa Timur 2004

Sayangnya data penyaluran kredit untuk usaha menengah belum ada data yang spesifik untuk menunjukkan perkembangannya. Namun, dengan banyaknya usaha-usaha besar yang berguguran pada saat krisis ekonomi tahun 1997 dapat dipastikan bahwa sebagian besar penyaluran kredit di luar KUK sejak tahun 1998 diarahkan pada usaha menengah.

Untuk mewujudkan *database* kredit perbankan kepada UKM maka sudah waktunya BI dan Pemerintah mewajibkan perbankan untuk mengikuti kriteria kredit UKM sesuai kesepakatan bersama menko Kesra selaku Ketua Komite penanggulangan Kemiskinan dengan Gubernur Bank Indonesia tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (No.11/KEP/MENKO/KESRA/IV/202 – No 4/2/KEP.GBI/2002 tanggal 22 April 2002) tersebut.

4.1.2 Sektor Riil Di Indonesia

4.1.2.1 Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia

Susunan sektor riil pada periode penelitian di Jawa Timur mengalami perubahan akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Oleh karena itu, usaha kecil dan menengah pada periode tersebut mengalami pergeseran, usaha atau industri besar banyak yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya menjadi usaha skala kecil dan menengah.

Saat dampak krisis mengalami puncaknya pada tahun 1998, usaha dari semua kategori mengalami pertumbuhan negatif. Penurunan terbesar yang terjadi pada usaha besar disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Pertama, pada saat krisis terjadi banyak usaha besar yang tidak mampu untuk menutupi biaya produksinya. Kedua, tingkat ketergantungan usaha besar terhadap impor (komponen, mesin, dan peralatan produksi, bahan baku, dan input lainnya) jauh lebih tinggi daripada usaha kecil dan menengah, krisis ekonomi yang terjadi mengakibatkan biaya impor dalam rupiah

menjadi sangat mahal sehingga banyak usaha besar yang harus mengurangi volume produksinya bahkan menghentikan kegiatan produksinya. Ketiga, ketergantungan usaha besar terhadap dana perbankan pada umumnya lebih tinggi dari skala usaha yang lain dan semasa krisis akses ke kredit perbankan sangat sulit karena pihak perbankanpun mengalami krisis serta tingginya suku bunga pinjaman pada saat itu mengakibatkan usaha besar mengalami stagnasi.

Tabel 4.2

**Jumlah UKM di Indonesia
1997-2003 (unit)**

Tahun	Skala Usaha		Jumlah	Industri Besar
	Kecil	Menengah		
1997	39704661	60449	39765110	2097
1998	36761689	51889	36813578	1831
1999	37859509	52214	37911723	1885
2000	38669355	54632	38723987	1973
2001	38853741	51227	38904968	1806
2002	40705676	58992	40764668	2074
2003	42326519	61986	42388505	2243

Sumber : Data Pengusaha Kecil dan Menengah di Propinsi Jawa Timur 2005

Hal ini dapat dilihat dari data bahwa sejak tahun 1998 jumlah industri besar mengalami penurunan yang drastis akibat krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. walaupun usaha kecil dan menengah juga mengalami penurunan namun persentasenya jauh lebih kecil daripada usaha besar. Data inilah yang memperkuat fakta bahwa dalam kondisi krisispun usaha kecil dan menengah mampu bertahan dimasa-masa yang sulit dibandingkan dengan industri besar.

Pengembangan usaha kecil terhadap pembangunan ekonomi memang tidak banyak dibahas, utamanya bagaimana mewujudkan pembangunan melalui pengembangan usaha kecil menyebutkan tentang kelebihan penting yang dimiliki oleh usaha kecil, antara lain :

1. Efisiensi Ekonomi

Dengan memberikan modal bagi usaha kecil akan meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara karena dengan memberikan bantuan modal yang tidak besar dapat memaksimalkan suatu potensi usaha yang kecil menjadi lebih besar dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak

2. Melengkapi Sektor Industri

Usaha kecil yang terus berkembang lama kelamaan akan menjadi sebuah industri sehingga hal ini akan membantu pemerintah dalam program industrialisasi negara yang awalnya merupakan negara agraris dalam tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

3. Melengkapi persediaan barang konsumen

Dengan semakin berkembangnya usaha kecil di masyarakat akan lebih menambah jumlah pilihan barang maupun jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat sehingga akan tercipta iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

4. Penggunaan bahan mentah lokal

Dengan meningkatnya jumlah maupun kualitas usaha kecil yang berkembang maka pastinya akan menggunakan bahan lokal lebih banyak karena usaha

kecil akan lebih efisien apabila menggunakan bahan lokal daripada menggunakan bahan dari luar negeri.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia wiraswasta

Pada awalnya kebanyakan usaha kecil merupakan suatu usaha informal yang hanya melibatkan sedikit orang. Tetapi apabila usaha kreatif ini mampu berkembang dan berkompetisi di pasar berarti usaha yang awalnya kecil ini telah menciptakan sumber daya manusia yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi yang lain.

6. Hemat menggunakan modal

UKM merupakan usaha yang skalanya tidak terlalu besar sehingga apabila pihak perbankan atau pihak ketiga dalam hal ini pada khususnya tidak akan meminjamkan dana yang terlalu besar untuk mengembangkan suatu usaha jadi risiko yang ditanggungpun tidak terlalu tinggi.

7. Pengaruh pada lapangan kerja

Seperti telah disebutkan diatas bahwa pengembangan UKM secara tidak langsung akan menambah jumlah lapangan kerja sehingga pengangguran dapat dikurangi.

Sampai saat ini pengusaha kecil dan menengah masih diharapkan pada tiga masalah mendasar yaitu akses permodalan, akses pasar, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk mencari solusi bagi masalah tersebut.

4.1.2.2 Usaha Kecil dan Menengah di Jawa Timur

Selama ini, usaha kecil dan menengah di Jawa Timur telah berkembang tanpa perhatian yang besar seperti sekarang ini. Banyaknya masyarakat Jawa Timur yang mempunyai inisiatif untuk lebih memanfaatkan sumber daya yang ada disekitarnya baik bahan baku maupun tenaga kerja membuat usaha ini mampu mengembangkan diri dari modal sendiri tanpa bantuan permodalan dari perbankan maupun lembaga keuangan manapun. Lemahnya manajemen yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah yang ada di Jawa Timur ini disebabkan kurangnya pengetahuan yang mereka miliki sehingga prinsip usaha mereka tidak terlalu mementingkan keuntungan yang besar dan hanya mengharapkan usaha mereka dapat bertahan telah menjadi kebanggaan bagi mereka.

Setiap daerah tingkat I maupun tingkat II di Jawa Timur memiliki karakteristik komoditi yang berbeda-beda dan telah mampu menjadi komoditi ekspor tetap bagi daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi yang penting bagi daerahnya. Hal inilah yang membuat perkembangan UKM di Jawa Timur semakin banyak sejak tahun 1998 karena pada tahun tersebut banyak karyawan yang terkena PHK memutuskan untuk membuka usaha kecil atau usaha menengah untuk melanjutkan kehidupannya.

Sejak saat itulah manajemen usaha kecil maupun menengah menjadi lebih terkendali karena pemerintah maupun pihak perbankan mulai memperhatikan keberadaan usaha ini. Di satu sisi pemerintah mulai memberikan fasilitas-fasilitas yang salah satunya mendirikan departemen yang mengkhususkan diri untuk

mengembangkan UKM dari sisi manajemen. Hal ini sangat diperlukan apalagi di daerah tingkat II yang pengetahuannya lebih rendah akan pentingnya manajemen dalam menjalankan suatu usaha. Kinerja departemen ini masih dipertanyakan karena hingga saat ini masih banyak usaha di Jawa Timur yang belum berbadan hukum.

Badan hukum yang melindungi suatu usaha artinya sangat penting bagi kelanjutan usaha tersebut untuk jangka panjangnya karena untuk keperluan birokrasi apapun nomor badan hukum akan mempermudah kinerja usaha tersebut apalagi untuk keperluan permodalan karena sampai saat ini banyak bank yang mensyaratkan debiturnya harus memiliki badan hukum untuk melindungi dananya yang telah dipinjamkan karena apabila usaha tersebut tidak berbadan hukum akan menyalahi aturan kehati-hatian bank dalam memberikan kredit. Nomor badan hukum juga akan mempermudah UKM untuk mengeksport komoditinya ke luar negeri dan akan mendapat kepercayaan dari importir di luar negeri yang membeli komoditi tersebut karena mereka menganggap bahwa komoditi tersebut mempunyai kualitas yang tidak dapat diragukan.

Sejak tahun 1998, UKM di Jawa Timur kebanyakan memfokuskan usahanya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga untuk diekspor ke luar negeri. Hal ini dikarenakan sejak berdirinya Dinas Koperasi dan UKM, pemerintah lebih memfokuskan diri untuk memperhatikan kinerja UKM dalam outputnya karena hal tersebut merupakan tugas utama dinas tersebut. Setiap daerah yang mempunyai produk unggulan memaksimalkan kualitas maupun kuantitas output

atau komoditi khas daerah mereka dan hal ini sangat mempengaruhi perkembangan UKM di Jawa Timur.

Tabel 4.3

**Posisi UKM Jawa Timur
2001-2004 (unit)**

No	Tahun	Jumlah
1	2001	2117172
2	2002	2182649
3	2003	2250152
4	2004	2320000

Sumber : Data Pengusaha Kecil dan Menengah di Propinsi Jawa Timur 2005

4.1.2.3 Kontribusi UKM terhadap PDB dan Tenaga Kerja

UKM di Indonesia khususnya di Jawa Timur sangat penting peranannya terutama dalam penciptaan dan pertumbuhan kesempatan kerja. Hal ini didasarkan pada fakta empiris yang menunjukkan bahwa kelompok usaha ini memperkerjakan jauh lebih banyak orang dibandingkan dengan jumlah orang yang bekerja di uaha besar secara bersama.

Hal ini terjadi karena UKM tidak memerlukan tenaga kerja yang harus ahli dalam bidangnya namun pekerja tersebut harus mampu mengerjakan hal-hal yang menjadi standar perusahaan. Selain itu, kebanyakan UKM merupakan industri yang padat karya sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang banyak dalam proses produksinya.

Dengan berkembangnya jumlah UKM di Jawa Timur secara langsung akan membuka lapangan kerja yang baru bagi para pencari kerja. Secara tidak langsung berkembangnya UKM mengurangi pengangguran di suatu daerah karena dari fakta yang ada justru persentase tenaga kerja yang terserap dari UKM mendominasi dibandingkan dengan usaha besar.

Pentingnya UKM sebagai sumber lapangan kerja yang baru di Indonesia tidak hanya dapat dilihat dari data yang tersedia namun hal ini juga dapat dilihat dari tren kenaikan jumlahnya tiap tahun yang jauh lebih besar dari usaha besar. Hal ini dapat terjadi karena jumlah unit UKM juga berkembang lebih pesat dibandingkan dengan usaha besar tiap tahunnya apalagi setelah tahun 1997.

Tabel 4.4

**Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja UKM Jawa Timur
2001-2004 (orang)**

No	Tahun	Jumlah
1	2001	10585000
2	2002	10910000
3	2003	11250000
4	2004	11600000

Sumber : Data Pengusaha Kecil dan Menengah di Propinsi Jawa Timur 2005

Selain kontribusinya dalam menyerap tenaga kerja, UKM di Indonesia juga menjadi salah satu sumber penting pendapatan atau PDB baik PDB nasional maupun regional Jawa Timur. Hal ini juga tidak lepas dari peran UKM dalam memberikan devisa kepada negara saat UKM mengekspor komoditinya ke luar negeri khususnya komoditi nonmigas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa UKM merupakan salah satu sektor yang harus diperhatikan oleh pemerintah keberadaannya karena keberadaannya mampu mempertahankan perekonomian negara kita walaupun sampai sekarang belum terlalu besar peranannya seperti usaha besar saat sebelum krisis 1997. Namun keberadaannya merupakan suatu *economic intrusion* (perembesan ekonomi) yang mampu menyerap sumber-sumber daya yang telah tidak terpakai kembali oleh usaha-usaha besar setelah besar baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang merupakan bahan baku penting bagi usaha besar dulunya sehingga kebocoran yang diakibatkan oleh krisis 1997 tidak terlalu banyak dan mampu dimanfaatkan kembali bahkan hal ini mampu meringankan beban daerah khususnya Jawa Timur karena keberadaan UKM mampu mengurangi pengangguran yang diakibatkan oleh tutupnya beberapa usaha besar dan yang paling utama adalah dapat mengurangi kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah walaupun sebenarnya di tingkat kotamadyapun tingkat kemiskinan bertambah sejak krisis 1997

Tabel 4.5

**Kontribusi UKM terhadap PDRB Jawa Timur
2001-2004 (triliun Rp)**

No	Tahun	PDB UKM	PDB JATIM	Persentase
1	2001	95.64	193.763	51.60%
2	2002	110.24	219.872	51.91%
3	2003	133.64	253.689	52.68%
4	2004	153.72	288.949	52.73%

Sumber : Data Pengusaha Kecil dan Menengah di Propinsi Jawa Timur 2005

4.2 Pembahasan

4.2.1 Permasalahan Kredit UKM di Jawa Timur

4.2.1.1 Permasalahan Kredit UKM dari Pihak UKM

Sampai saat ini pengusaha kecil dan menengah masih dihadapkan pada tiga permasalahan mendasar, yaitu akses permodalan, akses pasar, dan sumber daya manusia. Akses pemasaran UKM juga merupakan salah satu permasalahan yang cukup serius dihadapi oleh UKM. Apabila UKM tidak mampu menghadapi masalah ini maka kelangsungan usahanyapun akan terus mengambang. Selain itu, tidak adanya inter koneksi antara satu UKM yang sejenis dengan UKM sejenis lainnya, maka pasar menganggap produk yang diinginkan terbatas.

Modal bagi UKM bukanlah satu-satunya permasalahan yang dihadapi oleh UKM pada periode penelitian tapi hal ini merupakan salah satu pendukung utama bagi UKM untuk mengembangkan usahanya. Hingga saat ini pertumbuhan kredit pertahunnya masih rendah dan daya serapnya terhadap UKM masih lemah. Hal ini bukan disebabkan rendahnya kebutuhan UKM terhadap kredit. Justru yang menjadi permasalahan utama UKM salah satunya adalah permodalan. Selain itu, rendahnya daya serap kredit UKM juga disebabkan oleh ketatnya aturan perbankan dalam memberikan kredit yang salah satunya menyangkut ada tidaknya agunan dan pada faktanya banyak UKM yang tidak memiliki jaminan.

Persoalan lain yang dihadapi oleh UKM dalam mendapatkan kredit adalah Informasi yang tidak sempurna (*Assymmetric Information*). Sebagian besar pengusaha kecil dan menengah tidak tahu prosedur yang benar untuk mendapatkan

kredit yang murah yaitu kredit yang mudah diakses dan berbunga lunak bagi usahanya. Kesenjangan informasi yang besar antara pengusaha UKM dan lembaga UKM menyebabkan beberapa pengusaha UKM yang justru sangat membutuhkan permodalan tidak dapat memperoleh informasi yang benar tentang cara mendapatkan kredit. Hal ini juga dipacu oleh masih rendahnya kemampuan UKM sendiri dalam mencari informasi yang benar untuk mendapatkan kredit yang disediakan oleh lembaga keuangan.

Selain itu, beberapa UKM juga masih berstatus informal sehingga terbatas akses kreditnya terhadap perbankan. Hal ini berkaitan dengan prinsip kehati-hatian perbankan dalam memberikan kredit karena mengingat adanya kemungkinan risiko pengembalian atau kredit macet. Masih banyaknya UKM yang tidak berbadan hukum membuat perbankan tidak dapat memberikan kredit dengan alasan UKM tersebut tidak *bankable* (memenuhi syarat perbankan dalam mendapatkan kredit) walaupun UKM tersebut *feasible* (mempunyai visi usaha yang jelas).

4.2.1.2 Permasalahan Kredit UKM dari Pihak Perbankan

Setelah kita melihat permasalahan kredit UKM dari sisi UKM maka sekarang kita lihat permasalahan dari sisi perbankan. Permasalahan utama terletak pada perbankan yang mempunyai banyak persyaratan demi menjaga dananya dari kredit macet.



Sumber : Kutipan Laporan Tahunan BI dari beberapa edisi

Agunan yang ada dianggap kurang mencukupi (tidak *bankable*). Kondisi inilah yang harus dimengerti dan dipahami oleh masing-masing pihak agar diperoleh solusi yang menguntungkan dari kedua belah pihak. Bank harus menghitung risiko dan mempertahankan kinerjanya dalam mengelola dana masyarakat, sehingga pemberian kreditpun juga harus dilakukan dengan hati-hati dan benar-benar diberikan kepada UKM yang layak dan *eligible*. Sebelum membahas permasalahan kredit UKM

yang dihadapi oleh perbankan, penulis membahas prosedur pemberian kredit UKM yang biasa diterapkan oleh perbankan Indonesia.

4.2.1.2.1 Prosedur Pemberian Kredit UKM

Proses pemberian putusan kredit, prosedur kredit dibagi dalam empat tahapan, yaitu tahapan kegiatan prakarsa dan analisa atas permohonan kredit, tahapan pemberian rekomendasi kredit, dan tahapan pencairan kredit. Masing-masing tahap tersebut dilakukan oleh pejabat yang berbeda-beda. (Suhardjono, 2002 : 195-218)

1) Kegiatan Prakarsa dan Analisa Permohonan kredit

a) Kegiatan Prakarsa Permohonan Kredit

Kegiatan pada tahap ini antara lain adalah penerimaan permohonan kredit, baik untuk permohonan kredit baru, perpanjangan kredit, perubahan jumlah kredit, perubahan syarat kredit, restrukturisasi maupun penyelesaian kredit. Permohonan kredit diajukan secara tertulis dan menggunakan format yang telah ditentukan oleh bank yang memuat informasi mengenai kondisi pemohon/ calon debitur termasuk riwayat kreditnya pada bank lain (kalau ada). Atas permohonan kredit tersebut pejabat yang bersangkutan akan melakukan penelitian awal (*pre screening*).

Prescreening akan melihat beberapa ketentuan bank yang harus dipenuhi oleh calon debitur yaitu, calon debitur termasuk target pasar, calon

debitur termasuk kelompok yang dapat dilayani, jenis usaha tidak dilarang, dan sebagainya sesuai ketentuan masing-masing bank.

Ketentuan-ketentuan bank tersebut merupakan pedoman awal dalam pelayanan pemberian kredit yang dibuat berdasarkan pengalaman memberikan kredit yang dikaitkan dengan risiko bisnis. Apabila calon nasabah tersebut diluar kriteria yang ditentukan oleh bank, maka permohonan kredit akan ditolak sedangkan apabila termasuk dalam kriteria yang dapat dilayani maka disampaikan kepada calon nasabah bahwa permohonan akan diproses lebih lanjut dan selanjutnya pejabat pemrakarsa kredit akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk analisa permohonan kredit agar dapat mengambil kesimpulan untuk menilai layak tidaknya kredit diberikan..

Pelaksanaan analisis kredit berpedoman pada UU No.10 Tahun 1988 tentang dirubahnya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan khususnya pasal 1 ayat (11), pasal 8, dan pasal 29 ayat 3 (Dendawijaya, 2000 : 91). Hal ini perlu dilakukan oleh bank untuk menghindari *default* (kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya beserta bunga yang telah disepakati bersama).

b) Kegiatan Analisa dan Evaluasi Kredit

Data dan informasi yang diperoleh pejabat pemrakarsa melakukan analisis dan evaluasi tingkat risiko kredit. Analisa dan evaluasi kredit dituangkan dalam format yang telah ditetapkan oleh bank dan disesuaikan

dengan jenis kreditnya. Dalam analisa tersebut sekurang-kurangnya mencakup informasi sebagai berikut :

- Identitas pemohon, antara lain : nama pemohon, domisili, bentuk usaha, jenis usaha, susunan pengurus, dan sebagainya. Informasi ini dimaksudkan untuk melihat gambaran awal tentang penanggung jawab utama atau pengelolaan perusahaan
- Tujuan Permohonan kredit, mencakup : jumlah kredit, obyek yang dibiayai, jangka waktu, dan sebagainya. Informasi ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran bahwa kredit tersebut benar-benar akan digunakan untuk membiayai usaha
- Riwayat hubungan bisnis dengan bank, mencakup : saat mulai hubungan, bidang hubungan bisnis, nilai transaksi bisnis, kualitas hubungan bisnis, dan jumlah total nilai hubungan bisnis

c) Kegiatan Perhitungan Kebutuhan Kredit

Perhitungan kebutuhan kredit dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti kredit yang benar-benar dibutuhkan oleh pemohon, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kelebihan kredit yang penggunaannya diluar usaha atau terjadi kekurangan kredit sehingga usaha tidak berjalan. Apabila dipandang perlu untuk mengetahui kepastian kredit yang dibutuhkan pemohon, bank dapat meminta studi kelayakan yang dibuat oleh konsultan atas beban biaya pemohon. Perhitungan kebutuhan kredit disesuaikan dengan jenis kreditnya masing-masing.

d) Pembagian Risiko Kredit

Upaya untuk mengurangi risiko kredit yang harus ditanggung, bank membagi risiko tersebut dengan perusahaan asuransi, yaitu dengan asuransi kredit, asuransi kerugian maupun asuransi jiwa debitur. Asuransi kredit adalah pertanggung jawaban kredit yang diberikan oleh perusahaan asuransi / lembaga penjamin baik secara *compulsary* (wajib) maupun *voluntary* atas permintaan bank dengan membayar premi dalam jumlah tertentu. Asuransi kerugian adalah pertanggung jawaban oleh perusahaan asuransi atas barang-barang aset (kecuali tanah) milik debitur yang dijamin kepada bank dengan membayar premi. Sedangkan asuransi jiwa kredit adalah pertanggung jawaban atas jiwa debitur bank perusahaan asuransi.

e) Negosiasi kredit

Negosiasi dilakukan dalam rangka mendiskusikan suatu permasalahan kredit yang terjadi antara pihak bank dengan pemohon, dalam rangka mencapai kesepakatan mengenai jumlah kredit, kelengkapan dokumen, struktur dan tipe kredit serta syarat-syarat kredit yang harus dipenuhi oleh pemohon.

2) Kegiatan pemberian Rekomendasi kredit

Rekomendasi kredit merupakan suatu simpulan dari analisa dan evaluasi atas proposal kredit yang disajikan oleh Pejabat Pemrakarsa Kredit. Rekomendasi harus secara jelas menguraikan kekuatan dan kelemahan serta identifikasi risiko yang akan

mempengaruhi kemampuan pemohon untuk memenuhi angsuran yang telah dijadwalkan, termasuk evaluasi proteksi kredit seperti asuransi kerugian, asuransi kredit, asuransi jiwa dan penanggungan (agunan).

3) Kegiatan Pemberian Putusan Kredit

Pemberian putusan kredit hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemutus Kredit atau Komite Kredit yang diberikan kewenangan memutus kredit oleh Direksi bank. Sebelum memberikan putusan kredit Pejabat Pemutus Kredit harus memeriksa dan meneliti kelengkapan paket kredit. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan bisnis yang dimilikinya, Pejabat pemutus dengan melihat analisa dan evaluasi kredit yang dibuat oleh pemrakarsa Kredit serta rekomendasi kredit akan mampu memberikan putusan kredit secara akurat. Pemberian Putusan kredit tersebut harus dilakukan secara tertulis dan dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir putusan kredit. Dalam memberikan putusan kredit tersebut harus memuat struktur dan tipe kredit, syarat dan ketentuan kredit serta ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan Pejabat Pemrakarsa dalam rangka pembinaan nasabah.

4) Kegiatan Persetujuan Pencairan Kredit

Pencairan kredit dapat dilakukan setelah instruksi pencairan kredit oleh petugas yang berwenang dan disetujui oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan pula. Adapun syarat untuk menerbitkan instruksi pencairan kredit adalah surat perjanjian

kredit dan surat perjanjian *accessoir* sehingga dapat diperiksa keabsahannya untuk pencairan dana kredit.

4.2.1.2.2 Analisa 6C

Analisis kredit 6C ini dilakukan oleh pejabat kredit yang meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap kualitas dan stabilitas usaha dengan mempertimbangkan posisi pasar dan persaingan, prospek usaha, karakter pemohon, latar belakang, dan kualitas manajemennya. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis kondisi keuangan pemohon untuk mengetahui usulan kredit yang dapat diterima ataupun yang akan ditolak. (Suhardjono, 2002 : 198-212)

Analisis 6C mencakup analisa watak, analisa kemampuan, analisa modal, analisa kondisi / prospek usaha, analisa agunan kredit, dan analisa hambatan, yang akan diuraikan sebagai berikut :

1) Analisa watak (*Character*)

Penilaian terhadap itikad baik atau kemauan baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya memang agak sukar untuk dilaksanakan, khususnya terhadap calon nasabah yang baru dikenal oleh bank. Penilaian akan lebih mudah dilakukan jika telah terjalin hubungan antara bank dengan calon debitur atau dapat dicarikan dari informasi yang mendukung, baik dari kalangan perbankan maupun dari kalangan bisnis. Informasi dari kalangan perbankan diperoleh dari surat menyurat / korespondensi antar bank, yang dikenal dengan *Bank Information*, termasuk

permohonan resmi ke Bank Indonesia untuk memperoleh informasi tentang calon debitur, baik mengenai pribadinya maupun perusahaan yang dimilikinya.

Analisa ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar atau mengembalikan pinjaman dari pemohon, mencakup perilaku pemohon sebelum dan selama permohonan kredit diajukan. Untuk mempermudah proses analisa bank dapat mendapatkan informasi mengenai hal ini melalui reputasi bisnis/reputasi perusahaan diantara relasi-relasinya, riwayat perusahaan, catatan kriminal, dan lain-lain. Pemohon kredit yang berperilaku selalu mendesak pencairan kredit dengan disertai janji-janji pemberian hadiah pada umumnya diragukan kemauannya dalam mengembalikan kredit.

2) Analisa modal (*Capital*)

Hal ini dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang dimilikinya. Semakin besar perusahaan yang dimiliki oleh calon nasabah, semakin mudah memperoleh data tentang modal sendiri. Perusahaan-perusahaan kecil pada umumnya tidak memiliki laporan keuangan yang dapat dianalisis oleh bank. Untuk itu, wirakredit (*account officer / credit officer*) harus melakukan dialog, wawancara, dan kunjungan ke perusahaan calon nasabah untuk menyusun sendiri perkiraan laporan keuangan sehingga diperoleh informasi tentang modal sendiri yang bisa digunakan untuk membiayai proyek disamping pembiayaan yang akan diberikan bank.

Analisa ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri (*own share*) untuk mendukung pembiayaan usaha.

Semakin besar kemampuan pemohon dalam menyediakan modal berarti semakin kecil porsi pembiayaan yang dilakukan bank.

Hal ini berarti juga semakin besarnya tanggung jawab pemohon untuk mengembangkan usahanya secara maksimal. Dalam melakukan analisa modal mencakup pula besar dan komposisi modal sebagaimana tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan perubahannya, perkembangan laba usaha selama tiga periode sebelumnya, dan sebagainya.

Penilaian terhadap permodalan ini penting mengingat kredit yang diberikan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai keseluruhan dana atau modal yang dibutuhkan debitur. Karena itu, idealnya jumlah kredit bank tidak melebihi jumlah modal yang ditanamkan debitur.

3) Analisa Kemampuan (*Capacity*)

Analisa ini merupakan penilaian terhadap calon nasabah kredit dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian atau akad kredit, yaitu melunasi pokok pinjaman disertai bunga sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diperjanjikan.

Analisa kemampuan dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman dari usaha yang akan dibiayai, mencakup aspek manajemen (kemampuan mengelola usaha), aspek produksi (kemampuan memproduksi secara berkesinambungan), aspek pemasaran (kemampuan memasarkan hasil produksi), aspek personalia (kemampuan tenaga kerja dalam mendukung aktivitas perusahaan), dan aspek finansial (kemampuan menghasilkan

laba). Dengan demikian penilaian kemampuan ini pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan debitur mengelola usahanya sehingga dapat berkembang dengan memanfaatkan kredit bank.

4) Analisa kondisi / prospek usaha

Faktor-faktor bisnis yang berada di lingkungan sekitar lokasi proyek akan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap ciri / corak bisnis atau proyek yang akan dibangun, baik proyek baru maupun proyek perluasan. Dalam rangka proyeksi pemberian kredit, kondisi perekonomian (*Condition of economy*) harus pula ikut dianalisis.

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus bisnis mulai dari bahan baku (pemasok), pengolahan, dan pemasaran (pembeli). Dalam pemasaran tersebut harus diperhatikan pula kondisi persaingan dari produk bersangkutan, barang substitusi yang beredar di pasar, potensi calon pesaing, peraturan pemerintah, dan lain-lain.

5) Analisa Agunan

Collateral atau agunan kredit merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum permohonan kredit disetujui atau dicairkan. *Collateral* atau agunan pada umumnya adalah barang-barang yang diserahkan peminjam kepada bank sebagai jaminan atas kredit atau pinjaman yang diterimanya.

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan yang dapat digunakan sebagai alat pengaman lapis kedua bagi bank dalam setiap pemberian kredit apabila kredit yang diberikan bermasalah. Hal ini diperlukan karena

bagaimanapun baiknya hasil analisis terhadap watak, kemampuan, permodalan, kondisi/prospek usaha pemohon apabila kredit menjadi bermasalah maka sumber pengembalian kredit hanya bersandar pada penjualan agunan.

Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 8 UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang diubah dengan UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Perbankan bahwa agunan kredit dapat hanya berupa barang proyek yang dibiayai atau hak tagih, namun demikian untuk jenis usaha tertentu barang proyek saja tidak cukup sehingga bank meminta agunan tambahan berupa barang-barang diluar proyek tersebut.

6) Analisa hambatan (*Constraint*)

Constraint merupakan faktor hambatan atau rintangan berupa faktor-faktor sosial psikologis yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan. Misalnya, suatu proyek peternakan babi yang direncanakan lokasinya di Lhokseumawe, Aceh yang tentu sulit untuk dilaksanakan (Hadiwijaya, 2000 : 99)

4.2.1.2.3 Persyaratan bank

Setiap tahapan dalam proses pemberian kredit harus selalu dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam menerapkan prinsip ini, bank melakukan beberapa upaya pengamanan terhadap kemungkinan timbulnya risiko di bidang kredit. Beberapa kegiatan dilakukan oleh perbankan untuk melindungi kreditnya seperti analisa 6C diatas serta memberikan batasan-batasan terhadap sektor-sektor yang prospektif untuk diberi kredit.(Suhardjono, 2002 : 126)

Menurut Bank Indonesia ada beberapa usaha yang tidak dapat memenuhi syarat perbankan untuk mendapatkan kredit. Jenis-jenis usaha tersebut adalah :

- Bidang usaha yang berdasarkan data internal dan eksternal sektor ekonomi segmen pasar telah jenuh
- Tidak memiliki prospek industri yang masih menguntungkan
- Terkait langsung dan tidak langsung dengan kegiatan politik dan bertentangan dengan hukum
- Potensi risiko bisnis usaha tidak dapat diidentifikasi
- Termasuk dalam *black list* otoritas moneter
- Pembiayaan yang bersifat spekulasi seperti pembelian dan pemilikan saham, dan lain-lain
- Debitur bermasalah dan atau macet pada bank atau kreditur lain
- Lokasi usaha terlalu jauh dari lokasi bank dan tidak terjangkau

4.2.1.2.4 Rigiditas Tingkat Suku Bunga

Rigiditas suku bunga perbankan ditentukan oleh kondisi internal perbankan. Permasalahan internal tersebut pada umumnya muncul karena perbankan mengalami trauma dan menjadi *over prudent* dalam banyak hal termasuk memberikan kredit terhadap UKM. Perilaku tersebut menjadi kurang kondusif bagi penurunan tingkat suku bunga kredit yang dinilai tinggi oleh para pengusaha UKM.

Beberapa hambatan tersebut juga tidak lepas dari permasalahan finansial internal yang dihadapi oleh bank. Diantara banyak faktor penghambat, terdapat tiga faktor penting yang dinilai mempengaruhi rigiditas tingkat suku bunga yang terjadi saat ini.

Pertama, kondisi permodalan bank. Tidak banyak bank yang memiliki modal atau *risk taking capacity* yang relatif memadai untuk mendukung pertumbuhan kredit yang tinggi. Kondisi seperti itu, hanya beberapa bank yang mampu meningkatkan rasio kreditnya pertahunnya tanpa mempengaruhi keadaan modalnya. Pertumbuhan ekonomi 5-6 persen pertahun dapat dicapai apabila pertumbuhan kredit minimal 22 persen per tahunnya.

Kedua, struktur aset dan *liability*. Struktur aset dan *liability* saat ini dinilai belum kondusif bagi pemberian pinjaman karena masih banyaknya aset bank yang didominasi obligasi pemerintah yang sangat sensitif terhadap SBI. SBI yang semakin rendah mengakibatkan penurunan pendapatan bank. Target ROA dan ROE harus dikompensasikan dengan sumber penerimaan lain atau mempertahankan agar kegiatan kredit tetap menghasilkan hasil yang tinggi. Hal ini juga memberikan kontribusi terhadap rigiditas tingkat suku bunga kredit.

Ketiga, *capacity building*. Salah satu penyebab lambatnya bank-bank dalam menyesuaikan tingkat bunga kreditnya ialah keterbatasan kapasitas atau kemampuan mengidentifikasi risiko. Trauma terhadap krisis membuat bank untuk lebih meningkatkan risiko kreditnya. Pemahaman dan informasi yang minim mengenai kondisi suatu sektor usaha menghambat bank untuk terjun lebih jauh ke UKM.

Namun jika dilihat lebih dalam, terdapat beberapa persoalan fundamental yang terkait dengan *capacity building*. Misalnya, pendapatan bunga yang tinggi sangat sensitif terhadap gerakan tingkat suku bunga SBI karena besarnya dominasi aset bank dalam obligasi pemerintah. Serta tingginya biaya operasional menandakan perlunya peningkatan efisiensi yang ditentukan pula oleh *capacity* yang ada. (Hadad, Dr muliawan, 2003)

4.2.2 Kebijakan Bank Sentral dalam Mengatasi Masalah

Sejak tahun 1960-an hingga tahun 1999, Bank Indonesia telah membantu UKM dalam bentuk pemberian Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang merupakan kredit subsidi untuk membantu berbagai sektor untuk mendukung pembangunan. Namun demikian disadari pula bahwa pemberian KLBI tersebut mempunyai dampak seperti efek inflatoir karena pemberian kredit yang cukup besar kepada masyarakat. Sejak UU No.23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia yang baru keluar, kegiatan penyaluran kredit ini berhenti dan tinggal pengelolaan kreditnya saja.

Namun demikian kegiatan pemberian kredit secara tidak langsung masih terus berjalan, yaitu melalui kegiatan :

- Dana KLBI yang masih ada di perbankan dan belum ditarik dananya maupun yang bersifat komitmen
- Peminjaman kembali KLBI oleh BUMN koordinator

- Pemanfaatan dana SUP No.005

Diberlakukannya UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia, maka kebijakan Bank Indonesia dalam membantu pengembangan UKM mengalami perubahan yang cukup mendasar. Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan bantuan keuangan atau KLBI, sehingga peranan Bank Indonesia dalam pengembangan UKM menjadi bersifat tidak langsung. Pendekatan kepada UKM khususnya peranan bank sentral telah bergeser dari *developmental role* menjadi *promotional role*. Pendekatan yang memberikan subsidi kredit dan bunga murah sudah bergeser kepada pendekatan yang lebih menitikberatkan pelatihan kepada petugas bank, penelitian, penyediaan informasi dan advokasi.

Dengan kondisi yang ada diatas, Bank Indonesia masih tetap memberikan dukungan pendanaan secara tidak langsung melalui :

- Dana KLBI yang dialihkan pengelolaannya kepada BUMN koordinator yang ditunjuk pemerintah (*relending* KLBI) yang merupakan amanat UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia, hingga saat ini dilaksanakan oleh BTN untuk kredit KPRS/RSS dan PT PNM untuk skim KLBI lainnya. Jumlah KLBI yang dialihkan sebesar Rp18,8 triliun dengan kelonggaran tarik sebesar Rp 5,6 triliun. BUMN koordinator dapat meminjamkan kembali dana KLBI tersebut sampai jatuh tempo masing-masing skim sampai dengan terakhir tahun 2020. hingga posisi desember 2004, dana yang telah dipinjamkan

kembali oleh BTN sebesar Rp 1,024 miliar dari posisi Desember 2004 oleh PT PNM sebesar Rp 1,964 triliun

- Dana Surat Utang Pemerintah (SUP) NO.005, Bank Indonesia yang berasal dari KLBI yang telah jatuh tempo dan kembali ke Bank Indonesia selama tahun 2000-2001 sehingga total dana SUP No.005 yang dapat direalisasi sekitar Rp 3,1 triliun. Sampai dengan saat ini pemerintah telah merealisasikan dana tersebut sebesar Rp 1,4 triliun. Pemerintah juga telah menunjuk beberapa bank pelaksana maupun lembaga keuangan lainnya untuk menyalurkan dana tersebut kepada UKM yang membutuhkan dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

Peranan Bank Indonesia dalam pendanaan kepada UKM mengalami perubahan paradigma namun bukan berarti kebijakan dan strategi untuk mendukung UKM menjadi berkurang tetapi disesuaikan dengan perundangan baru yang berlaku. Untuk itulah, kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan dan pemberdayaan UKM adalah dalam rangka mendorong peningkatan fungsi intermediasi perbankan serta untuk mendukung sistem perbankan yang sehat. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi :

1. Kebijakan kepada perbankan tentang pengaturan :

- PBI No 3/2/PBI/2001 tentang Kredit Usaha Kecil yang menganjurkan dan mendorong bank untuk menyalurkan kredit UKM

- PBI No.5/18/PBI/2003 mengenai pemberian bantuan teknis dalam pengembangan UKM yaitu pelatihan-pelatihan untuk perbankan dan lembaga pendamping, serta penyediaan informasi yang mendukung pengembangan UKM
- PBI No.6/25/PBI/2004 dan SE-BI No.6/44/DPNP perihal Rencana Bisnis Bank Umum dalam penyaluran kredit UKM sehingga diketahui komitmen dan komitmen pelaksanaan bank dalam menyalurkan kredit UKM
- PBI No. 7/2/PBI/2005 mengenai Kualitas Produktif untuk UKM sampai dengan Rp 500 juta hanya dinilai dari ketepatan pembayaran pokok dan bunga, dan penilaian agunan kredit sampai dengan Rp 5 miliar cukup dilakukan penilai internal bank
- PBI No. 7/5/PBI/2005 mengenai Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Umum Pasca Bencana Nasional di Aceh dan Sumut, yaitu penetapan kualitas kredit dan penyediaan dana lainnya sampai dengan Rp 5 miliar (UKM) hanya didasarkan pada pembayaran pokok dan bunga

2. Pemberian bantuan teknis :

- Pelatihan-pelatihan kepada petugas perbankan dan lembaga pendamping UKM dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam meningkatkan kemampuan dalam meningkatkan kredit UKM

- Kegiatan penelitian yang menunjang pemberian kredit kepada UKM dan pemberian informasi UKM
- Kegiatan Bazar intermediasi juga merupakan salah satu kegiatan bantuan teknis Bank Indonesia dengan tujuan untuk saling mendekatkan dan meningkatkan komunikasi antara perbankan dan UKM

3. Kerjasama dengan Pemerintah, melalui ;

- Penanggulangan kemiskinan dengan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) terutama peningkatan pemberian fasilitas kredit kepada penduduk miskin yang produktif
- Memfasilitasi berbagai pertemuan antara Pemerintah, Perbankan, dan para pelaku UKM dalam forum dialogis di kawasan timur Indonesia
- Pengembangan program Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang akan memberikan konsultasi dan pendampingan kepada UKM

Sejak berlakunya UU No. 23/ 1999, Bank Indonesia tidak diperbolehkan memberikan KLIBI atau sering disebut program dalam rangka membiayai usaha kecil. Selanjutnya pengelolaan KLIBI dalam rangka kredit program dialihkan kepada BUMN koordinator yaitu PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Bank Tabungan Negara. Namun demikian, Bank Indonesia masih dapat mendorong pengembangan UKM secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai kebijakan sebagai berikut.

Pertama, Bank Indonesia dapat menyesuaikan ketentuan perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait hal tersebut, sejak tanggal 4 Januari 2001 Bank Indonesia tidak mewajibkan lagi bank-bank untuk menyalurkan Kredit Usaha Kecil (KUK) dengan rasio tertentu (22,5% dari total kredit bank yang bersangkutan). Selanjutnya, bank-bank dibebaskan untuk menyalurkan KUK dan UKM sesuai yang tercantum dalam *business plan* yang bersangkutan.

Kedua, untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan dan pengembangan UKM telah terjadi kesepakatan antara Bank Indonesia dengan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK). Tujuan kesepakatan tersebut antara lain untuk mendorong bank umum dan BPR untuk meningkatkan pemberian kredit UKM sesuai dengan *business plan* masing-masing bank.

Ketiga, Pemberian Bantuan Teknis Bank Indonesia dalam bentuk pelatihan, penyediaan informasi. Tujuan semua bantuan teknis tersebut adalah dalam rangka membantu pengembangan UKM. Bentuk bantuan teknis pelatihan kepada bank adalah untuk memperkenalkan dan memotivasi serta mengembangkan kemampuan bank dalam melayani segmen usaha mikro dan kecil serta mengembangkan hubungan bank dengan kelompok usaha kecil dan menengah. Jenis pelatihan tersebut antara lain pelatihan kepada bank umum, bank perkreditan rakyat dan lembaga jasa penyedia pengembangan usaha mikro dan kecil (BDS-P) untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan ketrampilan BDS-P di bidang keuangan khususnya perkreditan guna peningkatan layanan jasa konsultasi dan pendampingan kepada UKM (jasa

pembuatan kelayakan usaha dan proposal permohonan kredit kepada perbankan) yang ditunjang dengan penelitian. Kegiatan penelitian diarahkan dalam model atau pola pembiayaan dan bantuan teknis yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan UKM. Beberapa kegiatan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia antara lain : *baseline economic survey, lending model* untuk komoditi potensial. Bentuk bantuan teknis penyediaan informasi adalah penyediaan data statistik perkreditan, data komoditas potensial di suatu daerah untuk dikembangkan dan diekspor, modal pembiayaan komoditi usaha kecil dan menengah. Sebagai upaya untuk lebih memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar terhadap hasil-hasil penelitian. Bank Indonesia telah mengembangkan Sistem Informasi Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK) yang meliputi Sistem Informasi *Baseline Economic Survey* (SIB), Sistem Informasi Aroindustri Berorientasi Ekspor (SIABE), Sistem Informasi Pola Pembiayaan (*Lending Model*), Sistem Informasi Penunjang Keputusan untuk Investasi (SPKUI), Sistem Informasi Prosedur Memperoleh Kredit (SIPMK).

Keempat, mendorong kerjasama antara lembaga (*linkage program*) antara bank umum dengan BPR dalam penyaluran kredit kepada UKM mengingat pasar usaha mikro yang relatif lebih luas dan keterbatasan penghimpunan dana oleh BPR. Sampai dengan bulan November 2003 telah terjalin 9 bank umum, 16 BPR di wilayah KBI Surabaya.

Kelima, Bank Indonesia mendorong perbankan untuk membentuk UKM *Center* yang berfungsi sebagai lembaga penyedia informasi UKM, memonitor dan mengawasi kredit kepada UKM dan sarana komunikasi. Beberapa bank seperti Bank

Niaga, BCA, Danamon, dan Bank Mandiri, telah membentuk *UKM Center* di beberapa kota besar dalam rangka memberikan kredit kepada UKM.

Keenam, meningkatkan lembaga keuangan mikro penyusun RUU Keuangan Mikro sebagai payung dari lembaga keuangan mikro (LKM). Selain itu diperlukan perluasan jaringan/kerjasama pembiayaan dan informasi antar LKM serta pemanfaatan dana-dana murah seperti dana bergulir yang berasal dari APBN maupun laba BIJMN.

Ketujuh, meningkatkan peran lembaga penjamin kredit yang telah ada seperti PT. Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha agar lebih optimal dalam rangka mendorong UKM.

Kedelapan, Forum Komunikasi / Rapat Koordinasi Perbankan, Pemerintah, dan sektor riil (UKM). Kegiatan ini dimaksudkan untuk membahas dan memberikan informasi kepada kalangan perbankan tentang kebijakan dan program pemerintah terkait dengan sektor usaha tertentu, mengetahui prospek pasar dan permasalahan pembiayaan yang dihadapi UKM.

4.2.3 Keefektifan Kebijakan Bank Indonesia dalam mengatasi masalah

Penelitian ini melihat keefektifan berbagai jenis kebijakan yang telah dibahas di atas melalui data yang didapatkan dari Bank Indonesia Surabaya.

Tabel 4.6**Posisi Kredit UKM Bank Umum Jawa Timur
2002-2004 (Miliar Rp)**

TAHUN	NILAI KREDIT
1997	7572
1999	4881
2000	6879
2001	8666
2002	15310
2003	19931
2004	26191

Sumber : Statistika Ekonomi dan Keuangan Daerah Jawa Timur 2004

Belum adanya data yang konkrit serta rincian dana yang benar mengenai posisi kredit perbankan untuk UKM maka tidak dapat diketahui data realisasi penyaluran kredit perbankan kepada UKM. Tidak tersedianya rincian kredit UKM ini disebabkan masih adanya penerapan yang berbeda-beda diantara perbankan terhadap kriteria jumlah kredit untuk UKM. Oleh karena itu, cukup sulit untuk dapat menyajikan gambaran secara rinci bank-bank mana saja yang berperan besar didalam pembiayaan terhadap UKM tersebut dan pada tahun 2001 BI telah memisahkan jumlah kredit yang disalurkan untuk usaha kecil, menengah, dan besar.

Apabila tren kredit UKM yang terjadi di Jawa Timur mengalami peningkatan maka dapat diartikan bahwa kebijakan yang telah diambil oleh bank sentral berhasil. . Walaupun dapat kita lihat bahwa dari tren yang ada menandakan bahwa kebijakan BI berhasil, peningkatan tersebut tidak signifikan dan masih belum maksimal karena

masih ada bank-bank yang belum meminjamkan kredit kepada UKM karena beberapa permasalahan yang telah kita bahas sebelumnya.

Tabel 4.7

**Tingkat NPL Kredit UKM Jawa Timur
2001-2004 (%)**

Tahun	Persentase
2001	2.80%
2002	5.27%
2003	4.53%
2004	2.35%

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Jawa Timur 2004

Tabel 4.7 memperlihatkan bahwa tingkat NPL atau kredit macet yang terjadi pada kredit UKM mengalami peningkatan pada tahun 2002 yaitu sebesar 5,27% namun pada tahun depannya telah mengalami penurunan sampai sebesar 4,53%. Sehingga hal ini meningkatkan *performance* kredit sebagai kredit yang tidak memberikan kontribusi kredit macet yang besar. Bahkan pada tahun 2004 tingkat kredit macet berkurang menjadi 2,35% sehingga memantapkan posisinya untuk mendorong perbankan agar memberikan kredit kepada UKM.

Tabel 4.8

**Distribusi Kredit UKM Jawa Timur
2003-2004 (Miliar Rp)**

Kota / Kabupaten	Nilai Kredit		Kota / Kabupaten	Nilai Kredit	
	2003	2004		2003	2004
Surabaya	13311	18000	Bojonegoro	301	295
Malang	2616	3576	Situbondo	242	294
Jember	915	1275	Tuban	230	274
Kediri	792	1191	Ponorogo	209	260
Sidoarjo	637	821	Sumenep	160	184
Banyuwangi	579	761	Magetan	116	163
Jombang	414	529	pacitan	128	136
Madiun	459	492	Lamongan	126	122
Probolinggo	420	476	Ngawi	116	110
Pasuruan	401	459	Trenggalek	107	109
Tulungagung	345	435	Nganjuk	107	105
Mojokerto	376	417	Sampang	61	64
Gresik	295	410	Kraksaan		25
Blitar	323	389	Batu		23
Pamekasan	564	338	Bawcan		11
Bangkalan	295	306	Kangean		8

Sumber : Statistika Ekonomi dan Keuangan Daerah Jawa Timur 2004

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka simpulan-simpulan yang berhasil didapat adalah sebagai berikut :

1. Persoalan Pendanaan perbankan untuk UKM pada umumnya dipermasalahkan pada 2 (dua) hal yaitu jaminan fisik yang dipersyaratkan dan kemudahan prosedur. Permasalahan tersebut selalu menjadi masalah klasik yang sering muncul dalam berbagai forum dan jawabannya adalah meminta bank untuk lebih “longgar” dalam pemberian kredit UKM terutama dalam kewajiban jaminan dan kemudahan prosedur. Karena untuk menjawab permasalahan tersebut juga harus dilihat dari perspektif bank yang harus menerapkan *prudential banking* (prinsip kehati-hatian) dan pengelolaan risiko.
2. Perbankan tidak dapat dikatakan sebagai satu-satunya penghambat dalam perkembangan kredit UKM yang lambat saat ini. Hal ini berkaitan dengan prinsip kehati-hatian perbankan dalam memberikan kredit karena mengingat adanya kemungkinan risiko pengembalian atau kredit macet. Bank harus menghitung risiko dan mempertahankan kinerjanya dalam mengelola dana masyarakat, sehingga pemberian kreditpun juga harus dilakukan dengan hati-hati dan benar-benar diberikan kepada UKM yang layak dan *eligible*.

5.2 Saran

Sesuai dengan simpulan yang dihasilkan, saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2005 yang telah dicanangkan sebagai Tahun Keuangan Mikro Indonesia (TKMI) diharapkan masing-masing pihak baik UKM dan perbankan untuk saling meningkatkan kemampuan dan pengertian. Bank hendaknya dapat lebih kreatif dengan mendirikan divisi baru yang mengkhususkan untuk melayani UKM dalam bentuk konsultasi dan bantuan administrasi karena apabila UKM dilayani dengan baik maka hal tersebut akan meminimalisasi kesenjangan informasi yang dialami oleh perbankan dan UKM. Di sisi lain, pengusaha UKM juga harus lebih meningkatkan pengetahuan manajemen, administrasi, dan keuangan sehingga memudahkan bank untuk menggali potensi yang dimiliki UKM
2. Bank Indonesia seharusnya meningkatkan perannya terutama dalam penyediaan data yang hingga saat ini kalangan umum belum dapat menerima data yang konkrit mengenai kredit UKM yang disalurkan perbankan sehingga kalangan umum masih menganggap bahwa pihak BI masih belum serius dalam menangani hal ini padahal sektor ini akan mampu meningkatkan pendapatan daerah apabila ditangani secara serius.

3. Program KKMB diharapkan makin meluas dan memberikan kontribusi bagi meningkatnya aksesibilitas UKM kepada perbankan dalam mempertemukan kepentingan kedua belah pihak. Bank akan mempertimbangkan pemberian kredit UKM apabila pengusaha UKM yang mengajukan proposal pembiayaan tersebut telah aktif di bidang usaha yang terkait tersebut minimal dua tahun dan berjalan sukses. Adanya *track record* dua tahun sukses tersebut akan memberikan keyakinan kepada bank terhadap manajemen perusahaan secara keseluruhan, khususnya masalah pemasaran.
4. BPR yang fokus terhadap kredit mikro justru dapat bertahan saat perbankan umum mengalami *credit crunch*. Selain itu, di setiap tingkat I terdapat Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah yang saat ini telah meluncurkan kredit lunak dengan bunga 6% pertahunnya yang dananya diambil dari APBD sehingga diharapkan hal ini mampu meningkatkan jumlah kredit yang diberikan kepada UKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiaty, Ratna E, 2005, Peranan dan Kebijakan BI dalam Mendukung Upaya Pengembangan dan Pendanaan UMKM, Surabaya, Seminar Pemaparan 5 Agenda Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung UMKM serta Pembiayaan Perbankan, Surabaya, Bank Indonesia
- Bank Indonesia, 1997-2004, Statistika Ekonomi dan Keuangan Daerah Jawa Timur, Surabaya, Bank Indonesia
- Bank Indonesia, 1997-2004, Statistika Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Jakarta, Bank Indonesia
- Diskop PKM Jatim, 2005, Data Pengusaha Kecil dan Menengah di Propinsi Jawa Timur, Surabaya, Diskop PKM Jawa timur
- 2005, Jumlah UKM Jawa Timur Desember 2004, Surabaya, Diskop PKM Jawa Timur
- Hadad, Muliaman D, 18 Agustus 2003, Masalah Rigiditas Suku Bunga, Surabaya, Harian Jawa Pos
- [http:// www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) , 13 April 2005
- [http:// www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id) , 13 April 2005
- Hubbard, 2002, Money, the Financial System, and the Economy, Fourth Edition, Boston, Pearson Education Inc
- ISBRC-PUPUK, 2003, Usaha Kecil di Indonesia, Jakarta, ISBRC-PUPUK
- Marta, M Fajar, 8 November 2004, Kala Perbankan Lepas dari Bayangan Krisis, Jakarta, Harian Kompas

----- 6 Desember 2004, Jaring Pengaman Keuangan bagi Usaha Mikro, Jakarta, harian Kompas

----- 23 Maret 2005, TKMI, Jangan Lagi Cuma Angin Segar, Jakarta, Harian Kompas

Miskhin, 2003, the Economics of Money, Banking, and Financial System, Sixth Edition, Boston, Pearson education Inc

Sekretaris Daerah, 2005, Petunjuk Teknis Dana Bergulir Modal Kerja Kepada Usaha Kecil dan Manengah di Jawa Timur melalui PT Bank Jatim dan PT BPR Jawa Timur, Surabaya, Pemerintah Propinsi Jawa Timur

Dendawijaya , Lukman, 2001, Manajemen Perbankan, Jakarta, Ghalia Indonesia

Prasetyantoro, A, 19 Oktober 2003, Kondisi Perkreditan Perbankan Kita, Jakarta, Harian Kompas

R, Prathama dan Mandala M, 2001, Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar, Jakarta, FEUI

Republik Indonesia, 1992, UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Jakarta, Republik Indonesia

Republik Indonesia, 1998, UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992, Jakarta, Republik Indonesia

Retnadi, Djoko, 2003, Fungsi Perbankan Nasional dalam Mendorong Penerapan Investasi pada UKM, Jakarta, UPP AMP YKPN Yogyakarta

----- 18 November 2004, Menengok Kebijakan UMKM di Malaysia, Jakarta, Harian Kompas

Siamat, Dahlan, 2004, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Keempat, Jakarta, Lembaga Penerbit FEUI

Suhardjono, 2003, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah, Yogyakarta, UPP AMP YKPN

Tarmidi, Lepi T, 1999, Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran, Jakarta, Bank Indonesia



Jumlah UKM Jawa Timur Desember 2004

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH UKM
1	Surabaya	150,250
2	Gresik	65,950
3	Sidoarjo	116,720
4	Jombang	78,000
5	Mojokerto	51,150
6	Kota Mojokerto	13,350
7	Bojonegoro	70,800
8	Lamongan	72,900
9	Tuban	70,250
10	Pamekasan	48,850
11	Bangkalan	53,100
12	Sampang	51,600
13	Sumenep	57,270
14	Kediri	81,200
15	Kota Kediri	21,570
16	Blitar	75,750
17	Kota Blitar	14,200
18	Tulungagung	66,420
19	Nganjuk	70,250
20	Trenggalek	48,250
21	Malang	132,100
22	Kota Malang	52,050
23	Pasuruan	82,900
24	Kota Pasuruan	17,500
25	Probolinggo	65,750
26	Kota Probolinggo	18,000
27	Lumajang	65,800
28	Madiun	47,800
29	Kota Madiun	18,400
30	Ponorogo	52,600
31	Pacitan	40,400
32	Ngawi	60,300
33	Magetan	49,500
34	Bondowoso	48,650
35	Banyuwangi	99,000
36	Situbondo	43,350
37	Jember	118,550
38	Kota Batu	29,520
	JUMLAH	2,320,000

**Subdin PKM
DINAS KOPERASI, PK DAN M
PROPINSI JAWA TIMUR**

DATA PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DI PROPINSI JAWA TIMUR

NO	TAHUN	JUMLAH UKM JAWA TIMUR	EKSPOR NON MIGAS	EKSPOR UKM JAWA TIMUR	PDB NASIONAL
1	2001	2.117.172	US \$ 4.623,99	44 T US \$ 485,51	4,60 T 10,50 % 3,45 %
2	2002	2.182.649	US \$ 4.964,56	47 T US \$ 585,74	5,56 T 12,00 % 3,66 %
3	2003	2.250.152	US \$ 5.440,61	52 T US \$ 788,88	7,49 T 14,50 % 4,10 %
4	2004	2.320.000	US \$ 6.194,48	59 T US \$ 991,11	9,41 T 16,00 % 5,00 %

NO	TAHUN	% UKM PADA PDB NASIONAL	PDRB JAWA TIMUR	VOLUME USAHA/KONTRIBUSI UKM PADA PDBRB JAWA TIMUR
1	2001	-	3,11 193.763 T	51,60 % 95,64 T
2	2002	-	3,40 219.872 T	51,91 % 110,24 T
3	2003	56,72 %	4,11 253.689 T	52,68 % 133,64 T
4	2004	-	5,43 288.949 T	52,73 % 153,72 T

NO	TAHUN	JUMLAH TENAGA KERJA UKM NASIONAL	JUMLAH TENAGA KERJA UKM JAWA TIMUR
1	2001	-	10.585.000 orang
2	2002	-	10.910.000 orang
3	2003	-	11.250.000 orang
4	2004	-	11.600.000 orang

UKM Total 31,60 T
63,20 T
50,60 %

PENYIMPULAN :

Jumlah Penduduk Jawa Timur 36,20 Jt orang
 Jumlah Tenaga Kerja Sektor UKM 11,60 Jt orang
 24,60 Jt orang

Tingkat produktif 7,50 Jt orang
 Kesempatan kerja 16,00 Jt orang
 Pengangguran 1,10 Jt orang

Sumber Data :

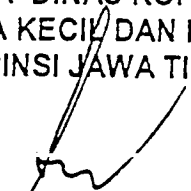
* Data diolah dari data (BI, BPS, Bapeprop, Deperindag Prop. Jatim dan Evaluasi

Perencanaan Koperasi dan UKM RI), tanggal 10 Mei 2005

DATA PENGUSAHA KECIL MENENGAH PROPINSI JAWA TIMUR

o	URAIAN	Satuan	Th.2001	Th.2002	Th.2003	Th.2004
	Omset >Rp 50 juta	PK	2.071.667	2.135.739	2.201.792	2.269.952
	a. Jumlah tenaga kerja	orang	9.604.000	9.900.000	10.207.300	10.523.200
	b. Omset penjualan	Rp.000	93.225.015.000	96.108.255.000	99.080.640.000	102.144.960.000
	c. Asset perusahaan	Rp.000	139.837.522.500	144.162.382.500	148.620.960.000	153.217.440.000
	Omset Rp 50 juta s/dRp 500 jt	PK	43.407	44.749	46.133	47.624
	a. Jumlah tenaga kerja	orang	754.448	777.000	802.000	826.830
	b. Omset penjualan	Rp.000	15.192.450.000	15.662.150.000	16.146.550.000	16.646.000.000
	c. Asset perusahaan	Rp.000	22.788.675.000	23.493.225.000	24.219.825.000	24.969.000.000
	Omset Rp 500 juta s/d Rp 2 M	PK	1.695	1.747	1.801	1.920
	a. Jumlah tenaga kerja	orang	156.690	161.482	166.640	172.088
	b. Omset penjualan	Rp.000	2.712.000.000	2.795.200.000	2.881.600.000	2.969.600.000
	c. Asset perusahaan	Rp.000	4.068.000.000	4.192.800.000	4.322.400.000	4.454.400.000
	Pengusaha Menengah	PM	403	414	426	504
	a. Jumlah tenaga kerja	orang	69.862	71.518	74.060	77.882
	b. Omset penjualan	Rp.000	1.007.500.000	1.035.000.000	1.065.000.000	1.100.000.000
	c. Asset perusahaan	Rp.000	1.511.250.000	1.552.500.000	1.597.500.000	1.650.000.000
	JUMLAH					
		PKM	2.117.172	2.182.649	2.250.152	2.320.000
		Tenaga kerja (orang)	10.585.000	10.910.000	11.250.000	11.600.000
		Omset penjualan (Rp.000,-)	112.136.965.000	115.600.605.000	119.173.790.000	122.860.560.000
		Asset perusahaan (Rp.000,-)	168.205.447.500	173.400.907.500	178.760.685.000	184.290.840.000

Surabaya, Mei 2005
 KEPALA DINAS KOPERASI
 PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
 PROPINSI JAWA TIMUR


 SOEDIRMAN. SH. MM
 NIP. 510 050 349